



LAPORAN KINERJA

BKIPM MANADO
TRIWULAN IV TAHUN 2024

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Manado dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Balai KIPM Manado tahun 2024. Sebagaimana diamanatkan dalam UU 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN, Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Penyusunan Laporan Kinerja ini juga didasarkan pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan kinerja Intansi Pemerintah.

Secara keseluruhan Laporan Kinerja (LKj) Balai KIPM Manado tahun 2024 merupakan sarana pelaporan kinerja dalam mengimplementasikan sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang berisi informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, visi, dan misi Balai KIPM Manado.

Landasan penyusunan Laporan Kinerja Balai KIPM Manado tahun 2024 adalah mengacuh pada Rencana Strategis Balai KIPM Manado Tahun 2021-2024 dan target kinerja Balai KIPM Manado 2023 berikut realisasinya. Pengelolaan manajemen kinerja di Balai KIPM Manado dilaksanakan dengan pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC). Selama tahun 2024 sebagian besar target sasaran strategis dan kinerja yang ditetapkan telah berhasil tercapai.

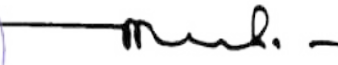


Laporan Kinerja BKIPM Manado Tahun 2024

Kepada Tim Penyusun Laporan Kinerja tahun 2024 kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas segala upayanya. Semoga laporan ini bermanfaat sebagai bahan masukan untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.



Manado, 05 Januari 2025


Muhlin, S.Pi, M.Si



RINGKASAN EKSEKUTIF

Pembangunan perkarantina berkembang memasuki paradigma baru yaitu dari pendekatan menunjang kegiatan produksi dengan dimensi biologi, berkembang kepada pendekatan yang berdimensi ekonomi dengan substansi kesehatan dan keamanan pangan dalam konteks globalisasi perdagangan dunia.

Secara umum pada tahun 2024, Balai KIPM Manado telah berhasil melaksanakan misi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam mendukung pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan pada Tahun 2024. Keberhasilan ini diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, pada berbagai perspektif *balanced score card*. Hal ini ditunjukkan dengan tercapainya target indikator kinerja utama Balai KIPM Manado pada Tahun 2024

Permasalahan yang dihadapi dan mempengaruhi pencapaian target kinerja, untuk selanjutnya akan menjadi perhatian utama dan akan dilakukan evaluasi guna merumuskan upaya-upaya ataupun strategi pemecahan masalah, sehingga di Tahun 2024 target kinerja utama yang telah ditetapkan dapat terealisasi dengan maksimal.



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
 BAB I Pendahuluan	
Latar belakang	1
Visi Misi Organisasi	4
Struktur Organisasi Balai KIPM Manado	5
 BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	
Sasaran Indikator dan Target Kinerja	6
Anggaran Balai KIPM Manado	9
 BAB III Akuntabilitas Kinerja	
Capaian Kinerja	10
Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja	12
 BAB IV Penutup	28
 Lampiran	30



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Target Kinerja tahun 2024	7
Tabel 2. Alokasi Pagu Balai KIPM Manado (RKAK/L)	9
Tabel 3. Capaian Kinerja Balai KIPM Manado TRIWULAN IV 2024	11
Tabel 4. Realisasi Anggaran tahun 2024 Per Jenis Kegiatan ,.....	27

BAB I PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

SAKIP merupakan instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja.

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, evaluasi AKIP harus dapat memberikan simpulan hasil penilaian beberapa variabel, antara lain kriteria-kriteria yang ada dalam penerapan komponen-komponen manajemen kinerja yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sebagai fakta obyektif instansi pemerintah/unit kerja mengimplementasikan SAKIP.

Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap unit kerja di Kementerian atas penggunaan anggaran untuk mencapai Target Kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Laporan Kinerja disusun periodik baik triwulanan (LKj Interim) maupun tahunan (LKj Tahunan). Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja, evaluasi, serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai terhadap hasil capaian Target Kinerja.

Pelaporan Kinerja dilaksanakan dengan tujuan:

- a. memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan
 - b. sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja.
- Pelaporan dilakukan menggunakan metode *bottom-up*.

Data diperoleh dari Unit terbawah lalu dikumpulkan di Unit di atasnya. Data capaian (dan Target) disampaikan secara lengkap disertai dokumen data dukung yang dibuat secara terpisah dari laporannya.

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Pasal 1 angka 11 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Laporan Kinerja (LKj) adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa Balai KIPM Manado berkewajiban menyusun Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja yang menggambarkan tingkat pencapaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Laporan kinerja memuat informasi tentang uraian singkat organisasi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud dan pencapaian sasaran dilaksanakan dengan membandingkan kinerja aktual dengan rencana atau target tahun-tahun sebelumnya yang berdasarkan pada target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis (Renstra).

Laporan Kinerja (LKj) atau sebelumnya disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berisi ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program, yang paling sedikit mencakup:

1. pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
2. realisasi pencapaian target kinerja organisasi;
3. penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan
4. perbandingan capaian kinerja kegiatan dan program sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis organisasi.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan LKj adalah pengukuran kinerja dan evaluasi, serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dengan adanya LKj, dapat diketahui tingkat capaian kinerja suatu unit organisasi dan hal lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama gambaran mengenai tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya. Laporan ini dapat juga digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran di tahun mendatang

LKj Triwulan IV Tahun 2024 Balai KIPM Manado disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Balai KIPM Manado dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama dan/atau sampai dengan triwulan IV tahun 2024 untuk mencapai visi dan misi BPPMHKP. Di samping itu juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja serta sarana untuk mendapatkan masukan bagi *stakeholder* demi perbaikan kinerja Balai KIPM Manado.

VISI DAN MISI ORGANISASI

Visi Balai KIPM Manado mengacu pada visi BPPMHKP, yaitu terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu yang terdepan untuk memastikan keamanan, kualitas, keberlanjutan dan daya saing hasil kelautan dan perikanan, dalam rangka mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera dan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan untuk Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian, berlandaskan gotong royong.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Balai KIPM Manado mempunyai misi yang sejalan dengan misi BPPMHKP, yaitu:

- Meningkatkan daya saing hasil kelautan dan perikanan melalui inspeksi, sertifikasi, surveilans, pengambilan contoh uji, pengujian dan monitoring.
- Meningkatkan penerapan praktik yang baik di setiap rantai pasok dan kepatuhan terhadap pemenuhan standar mutu hasil kelautan dan perikanan.
- Mewujudkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang efektif dan selaras dengan standar internasional.
- Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI BALAI KIPM MANADO

Dalam rangka mencapai visi, misi, fungsi, tujuan, serta sasaran strategis, Balai KIPM Manado perlu didukung oleh perangkat organisasi, proses bisnis/tata laksana, dan sumber daya aparatur yang mampu melaksanakan tugas yang dibebankan kepada Balai KIPM Manado secara efektif dan efisien. Untuk itu kegiatan pengembangan dan penataan kelembagaan yang meliputi organisasi dan proses bisnis/tata laksana, serta pengelolaan sumber daya aparatur mutlak dilaksanakan secara efektif, intensif, dan berkesinambungan.

1. Kedudukan, tugas dan fungsi Balai KIPM Manado :

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. 5 tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka Balai KIPM Manado merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (UPT BPPMHKP) mengemban tugas menyelenggarakan Pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai KIPM Manado menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.
- b. pelaksanaan pengendalian dan pengawanan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.
- d. pelaksanaan administrasi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

STRUKTUR ORGANISASI BALAI KIPM MANADO

Balai KIPM Manado merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPPMHKP di bidang pelayanan operasional, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.92/PERMEN-KP/2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Balai KIPM Manado mempunyai jumlah SDM aparatur yang mendukung saat ini berjumlah 16 orang ASN, 2 orang tenaga PPPK

Gambar 1

Struktur Organisasi Balai KIPM Manado



BAB II PERENCANAAN KINERJA

SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

Pada triwulan IV tahun 2024 yaitu bulan Oktober, terkait SOTK baru BPPMHKP sehingga terjadi perubahan tugas dan fungsi BPPMHKP, maka terjadi perubahan beberapa indikator kinerja kegiatan yang mengakibatkan perubahan dokumen kinerja.

Pada Perjanjian Kinerja (PK) sebelumnya jumlah indikator kinerja kegiatan berjumlah 17 IKU. Setelah mengalami revisi jumlah indikator menjadi 14 IKU.

Pada Sasaran Kegiatan 1, semua IKU mengalami perubahan yang semula 4 IKU menjadi 3 IKU dengan perubahan nama IKU juga.

Pada Sasaran Kegiatan 2, terdapat 2 IKU yaitu sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi lingkup UPT Balai KIPM Manado (%) dan Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan UPT Balai KIPM Manado (Nilai indeks).

Pada Sasaran Kegiatan 3, semula 9 IKU, setelah mengalami revisi menjadi 8 IKU dengan rincian 7 IKU tetap, 1 IKU dihilangkan karena bukan target (Pembangunan Unit Kerja Berpredikat WBK), 1 IKU mengalami perubahan nama yaitu “Nilai Kinerja Anggaran” menjadi “Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran”, penambahan 1 IKU yang semula terdapat pada Sasaran Kegiatan 2 yaitu Survei Kepuasan Masyarakat menjadi Indeks Kepuasan Masyarakat di Sasaran Kegiatan 3, dan penambahan 1 IKU baru yaitu Inovasi Pelayanan Publik. Berikut indikator kinerja kegiatan yang terdapat pada dokumen Perjanjian Kinerja Balai KIPM Manado (Revisi).

Tabel 1. Target Kinerja Tahun 2024

	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	
SKI	Terselenggaranya Pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Manado(%)	70	
		2	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Manado (%)	70	
		3	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Manado (%)	99	
SK2	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4	Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian dan Lembaga inspeksi lingkup UPT Balai KIPM Manado (%)	70	
		5	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan UPT Balai KIPM Manado (Nilai indeks)	3,36	
SK3	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan BPPMHKP	6	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Balai KIPM Manado (Indeks)	86	
		7	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Balai KIPM Manado (Nilai)	82	
		8	Persentase Penyelesaian temuan BPK Lingkup Balai KIPM Manado (%)	100	
		9	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja lingkup UPT Balai KIPM Manado (Inovasi)	1	
		10	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Balai KIPM Manado (Nilai)	93,76	
		11	Nilai Perencanaan Kinerja Anggaran lingkup UPT Lingkup Balai KIPM Manado (Nilai)	71	
		12	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Balai KIPM Manado(%)	80	
		13	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Balai KIPM Manado(%)	80	

		14	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai KIPM Manado (%)	80	
--	--	----	---	----	--

Anggaran BPPMHKP Manado

Rencana Kerja dan Anggaran Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado tahun 2024 di arahkan untuk mencapai target-target kinerja pembangunan karantina ikan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang sudah di targetkan. Alokasi anggaran Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado tahun anggaran 2024 sebesar) Rp.6.915.758.000,-

Strategi Kebijakan anggaran yang diterapkan oleh Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado untuk mewujudkan target-target kinerja tersebut diantaranya dengan mereview kembali kegiatan-kegiatan prioritas sehingga alokasi anggaran yang tersedia dapat efektif, efesien dan akuntabel. Alokasi anggaran kegiatan disajikan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Alokasi Pagu Balai KIPM Manado (RKAK/L)

No	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Pengendalian Mutu	365.000.000,-
2	Manajemen Mutu	121.000.000,-
3	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	6.429.758.000,-
Total Anggaran Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Manado Tahun 2024		6.915.758.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2024 merupakan bagian dari penyelenggaraan Akuntabilitas kinerja yang tertuang di perjanjian Tahun 2024 dan membandingkannya dengan target yang diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, yang menitik beratkan pada pengukuran pencapaian tujuan/sasaran strategis, Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado menyempurnakan rumusan sasaran strategis dan indikator kinerja utama (IKU) ke dalam tiga sasaran strategis yaitu industrialisasi KP yang berdaya saing, Sumber daya kelautan yang berkelanjutan, tata Kelola pemerintahan yang baik.

Pengukuran capaian kinerja sasaran strategis meliputi identifikasi atas capaian IKU dominan dan membandingkan dengan targetnya. Analisis lebih mendalam dilakukan terutama terhadap capaian yang di bawah target untuk mengenali faktor penyebab sebagai bahan penetapan strategi peningkatan kinerja di Tahun 2021 dan atau tahun-tahun selanjutnya (performance improvement) yang masih disesuaikan dengan renstra Balai KIPM Manado Tahun 2021-2024, kinerja sasaran strategis merupakan resultante kinerja Balai KIPM manado.

Capaian atas 14 (Lima Belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado yang menunjukkan capaian sasaran strategis secara ringkas di sajikan pada Tabel 3 berikut ini.

**Tabel 3. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama Balai Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado
Triwulan IV Tahun 2024**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	REALISASI% Capaian	
SK1	Terselenggaranya Pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Manado(%)	70	100	142,85%
		2	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Manado (%)	70	100	142,85
		3	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Manado (%)	99	100	101 %
SK2	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4	Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi lingkup UPT Balai KIPM Manado (%)	70	83,10	118,71%
		5	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan UPT Balai KIPM Manado (Nilai indeks	3,36	3,74	111,30
SK3	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan BPPMHKP	6	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Balai KIPM Manado (Indeks)	86	89,97	104,616
		7	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Balai KIPM Manado (Nilai)	82	83,40	101,70
		8	Persentase Penyelesaian temuan BPK Lingkup Balai KIPM Manado (%)	100	100	100

		9	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja lingkup UPT Balai KIPM Manado (Inovasi)	1	1	100
		10	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Balai KIPM Manado (Nilai)	93,76	97,75	104,255
		11	Nilai Perencanaan Kinerja Anggaran lingkup UPT Lingkup Balai KIPM Manado (Nilai)	71	90,00	126,76
		12	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Balai KIPM Manado(%)	80	91,98	114,975
		13	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Balai KIPM Manado(%)	80	97,50	121,875
		14	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai KIPM Manado (%)	80	100	125

Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja

1. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan Mutu hasil Perikanan

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan hasil perikanan mejadi focus utama dalam pencapaian visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang didukung dengan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan BPPMHKP.

IKU 1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Manado(%)

Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer perikanan budidaya meliputi CBIB,CPIB,CPPIB,CPOIB, CDOIB dan perikanan tangkap meliputi CPIB di kapal yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Sektor produksi perikanan primer merujuk kepada kegiatan yang berfokus pada pengambilan dan pengelolaan sumberdaya hayati perairan yang meliputi penangkapan ikan, budidaya dan pengumpulan hasil laut lainnya.

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:

1. Standar Nasional Indonesia (SNI)
2. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku

Output kegiatan berupa rekomendasi yang diberikan dari hasil inspeksi dalam sistem OSS maupun secara manual.

Formula untuk menghitung capaian IK:

$$\%X = \frac{A+B+C+D+E+F}{xn} \times 100\%$$

%X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan.

A = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CBIB

B = Persentase Unit menerapkan CPIB

C = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CPPIB

D = Persentase Unit Usaha menerapkan CPOIB

E = Persentase Unit Usaha menerapkan CDOIB

F = Persentase Unit Usaha menerapkan CPIB Kapal
 xn = Jumlah dari unsur pembentuk (6)*)

*) *Komponen pembentuk yang dihitung berdasarkan karakteristik sertifikasi jaminan mutu sektor produksi primer yang ada di UPT*

Sertifikasi jaminan mutu sektor produksi primer yang ditargetkan di Balai KIPM Manado pada triwulan IV tahun 2024 yaitu CPIB (Cara Pembenihan Ikan Yang Baik) dan CPIB Kapal (Cara Penanganan Ikan yang Baik di atas Kapal).

Realisasi sertifikat CPIB sebanyak 1 sertifikat dari target 1 sertifikat atau tercapai 100%, dan realisasi sertifikat CPIB Kapal tercapai 100% dari target 4 sertifikat.

Berikut capaian dan perhitungan IK “Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Manado ”:

- **CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik):**

Target Sertifikat CBIB = 0 Capaian Sertifikat CBIB = 0

$$\text{Persentase Capaian (A)} = \frac{0}{0} \times 100\% = 100\%$$

- **CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik)**

Target Sertifikat CPIB = 2 sertifikat

Capaian Sertifikat CPIB = 1 sertifikat Persentase

$$\text{Persentase Capaian (B)} = \frac{1}{2} \times 100\% = 50\%$$

- **CPPIB (Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik)**

Target Sertifikat CPPIB = 0

Capaian Sertifikat CPPIB = 0

Persentase Capaian (C) = $\frac{0}{0} \times 100\% = 100\%$

- **CPOIB (Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik)**

Target Sertifikat CPOIB = 0

Capaian Sertifikat CPOIB = 0

Persentase Capaian (D) = $\frac{0}{0} \times 100\% = 100\%$

- **CDOIB (Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik)**

Target Sertifikat CDOIB = 0

Capaian Sertifikat CDOIB = 0

Persentase Capaian (E) = $\frac{0}{0} \times 100\% = 100\%$

- **CPIB Kapal (Cara Penanganan Ikan Yang Baik Di atas Kapal)**

Target Sertifikat CPIB = 0

Capaian Sertifikat CPIB = 0

Persentase Capaian (F) = $\frac{0}{0} \times 100\% = 100\%$

Capaian Indikator IK01:

$$\begin{aligned}\%X &= \frac{A+B+C+D+E+F}{xn} \times 100\% \\ &= \frac{100\%+100\%+100\%+100\%+100\%+100\%}{6} \times 100\% \\ &= 100\% \times 100\% \\ &= 100\%\end{aligned}$$

Indikator ini merupakan indikator baru pada Triwulan IV Tahun 2024 ini dan capaian IKU ini ditargetkan 70% dan tercapai 100% sehingga capaiannya menjadi 142,85%

IKU 2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Manado (%)

Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor Produksi Pasca Panen meliputi: PMMT/HACCP dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi Penanganan, Pengolahan, Distribusi, hingga pemasaran produk perikanan.

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:

1. Standar Nasional Indonesia (SNI);
2. Standar Internasional (Codex Alimentarius);
3. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku.

Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dan SKP yang diterbitkan berdasarkan ruang lingkup produk, jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah.

Formula untuk menghitung capaian IK:

$$\%X = \frac{A+B}{xn} \times 100\%$$

%X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan.

A = Presentase Penerbitan Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang

lingkup produk

B = Persentase SKP yang diterbitkan di Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan menengah besar yang menerapkan GMPSSOP

xn = Jumlah dari unsur pembentuk *)

***) Komponen pembentuk yang dihitung berdasarkan karakteristik sertifikasi jaminan mutu sektor produksi pasca panen yang ada di UPT**

HACCP merupakan suatu sistem manajemen keamanan makanan yang didasarkan pada tindakan pencegahan terhadap bahaya yang bersifat biologi, kimia dan fisik pada hasil perikanan untuk konsumsi manusia. Dengan penerapan sistem HACCP, identifikasi suatu bahaya yang mungkin akan muncul di dalam proses pengolahan (*in process inspection*) dapat dilakukan sehingga tindakan pengendalian dan pemantauan terhadap bahaya keamanan makanan akan mudah dilaksanakan.

Sertifikat penerapan HACCP merupakan salah satu persyaratan mutlak dan wajib harus dimiliki oleh unit Pengolahan ikan, bila akan melakukan ekspor hasil produksi perikananannya. Sertifikasi penerapan HACCP mengacu kepada persyaratan dan tata cara penerbitan sertifikat penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/ HACCP sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 51/PERMEN-KP/2018 dan Peraturan Kepala BKIPM Nomor PER.03/BKIPM/2011.

Sertifikat HACCP yang diterbitkan berdasarkan jenis produk dan jenis proses serta potensi bahaya (*hazard*).

Permohonan sertifikat penerapan HACCP:

- UPI mengajukan permohonan
- Dilakukan audit kecukupan oleh Pusat SM
- Inspeksi oleh inspektur mutu
- UPI melakukan tindakan perbaikan
- Evaluasi dan verifikasi tindakan perbaikan
- Penerbitan sertifikat HACCP Perpanjangan sertifikat penerapan HACCP:
- Verifikasi dan survailen konsistensi penerapan HACCP di UPI
- Penerbitan sertifikat HACCP

Sertifikat Kelayakan Pengolahan disingkat SKP adalah sertifikat yang diberikan kepada Pelaku Usaha terhadap setiap unit pengolahan ikan yang telah menerapkan Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan memenuhi persyaratan Prosedur Operasi Standar Sanitasi.

Pelaku Usaha industri Pengolahan Ikan yang telah menerapkan Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan memenuhi persyaratan Prosedur Operasi Standar Sanitasi diberikan SKP bagi setiap jenis ikan yang ditangani dan/atau jenis produk yang diolah.

Persyaratan permohonan untuk memiliki SKP:

- a. NIB;
- b. Fotokopi SPI atau sertifikat keterampilan di bidang keamanan pangan yang setara untuk penanggung jawab mutu;
- c. Panduan mutu penerapan Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan pemenuhan persyaratan Prosedur Operasi Standar Sanitasi; dan
- d. Rekomendasi Kelayakan Pengolahan dari Pembina Mutu di daerah.

Pada Triwulan IV Tahun 2024 ini capaian IKU ini ditargetkan 70% dan tercapai 100% sehingga capaiannya menjadi 142,85%

IKU 3. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Manado (%)

Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor merujuk pada perbandingan antara jumlah ikan dan hasil perikanan yang disertifikasi (jumlah HC yang terbit) dan volume yang diekspor ke pasar internasional dan penolakan terhadap produk ikan dan hasil perikanan oleh negara tujuan ekspor (HC yang ditolak oleh negara tujuan ekspor).

Pengiriman ikan dan hasil perikanan yang diekspor telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan serta tidak dilakukan penolakan oleh negara tujuan ekspor. Rasio ini penting untuk memahami bagaimana sektor perikanan memberikan kontribusi terhadap perekonomian khususnya perdagangan internasional.

Sertifikat Kesehatan (*Health Certificate*) adalah sertifikat yang menyatakan bahwa ikan dan hasil perikanan telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan untuk konsumsi manusia dan bukti pengiriman hasil perikanan yang telah memenuhi persyaratan adalah diterimanya Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan.

Sampai dengan triwulan IV IKU ini pada Balai KIPM Manado ditargetkan 99% dan telah tercapai 100% sehingga capaiannya menjadi 101%.

II. Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar.

Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar. focus utama dalam pencapaian visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang didukung dengan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan BPPMHKP

IKU 4. Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi lingkup UPT Balai KIPM Manado (%)

Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi merupakan hasil penilaian dari evaluasi terhadap laboratorium dalam mematuhi standar mutu yang berlaku yang mengacu pada ISO/IEC 17025 dan ISO/IEC 17020 dan dinyatakan dalam bentuk presentase berdasarkan Tingkat kesesuaian terhadap kriteria yang telah ditetapkan dalam standar tersebut. Skor tinggi menunjukkan bahwa laboratorium telah memenuhi atau mendekati pemenuhan terhadap standar sistem manajemen mutu, sedangkan skor rendah menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan sistem manajemen mutu yang perlu diperbaiki.

ISO/IEC 17025 merupakan sebuah standar pada laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi yang digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan pengakuan formal (akreditasi) sebagai laboratorium penguji yang kompeten dan menjadi dasar saling pengakuan terhadap validitas data hasil pengujian baik didalam maupun luar negeri

Tingkat pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji (ISO 17025) di laboratorium *official control* yang dinilai melingkupi:

1. Ruang Lingkup;
2. Acuan Normatif
3. Persyaratan Umum;
4. Persyaratan Struktural
5. Persyaratan Sumber Daya;
6. Persyaratan Proses
7. Persyaratan Sistem Manajemen

ISO/IEC 17020 adalah standar yang mengatur persyaratan untuk Lembaga Inspeksi yang melakukan inspeksi teknis dan non teknis, standar ini bertujuan memastikan bahwa Lembaga inspeksi menjalankan proses inspeksi yang konsisten, objektif dan akurat sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Nilai kualitas penerapan ISO/IEC 17020 diperoleh dari nilai rata-rata penerapan sistem manajemen mutu Lembaga inspeksi (ISO 17020) yang dinilai melingkupi:

1. Persyaratan Umum
2. Persyaratan Struktural
3. Persyaratan Sumberdaya
4. Persyaratan Proses
5. Persyaratan Sistem Manajemen

Pada Triwulan IV Tahun 2024 ini iku ini ditargetkan 70% dan terealisasi sebesar 83.10 hingga capaiannya menjadi 118.71%

IKU 5. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan lingkup UPT BPPMHKP (Indeks)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup BPPMHKP menggunakan eletronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat: https://ptsp.kkp.go.id/skm/login_Aplikasi yang terdapat di web tersebut dapat di akses oleh kepada pengguna jasa di masing masing UPT BPPMHKP.

Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa Persyaratan; Sistem; Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan; dan Sarana.

Nilai indeks diperoleh dari nilai total rata-rata hasil kuisioner dari seluruh UPT BPPMHKP.

Pada Triwulan IV tahun 2024 IKU ini ditargetkan indeks 3,36 dan terealisasi menjadi 3.74 sehingga capaiannya menjadi 113.30

III. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik sudah merupakan kebutuhan yang tidak terelakkan. Pemerintah sekarang wajib mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku dalam menjalankan roda pemerintahan.

IKU 6. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Balai KIPM Manado

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas- tugasnya, Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018), Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Pengembangan SDM BKIPM, menekankan manusia sebagai pelaku yang memiliki etos kerja produktif, keterampilan, kreativitas, disiplin, profesionalisme, loyalitas serta memiliki kemampuan memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi maupun kemampuan manajemen. Hal ini harus terus dikembangkan baik secara kualitas maupun kuantitas guna keberhasilan pembangunan BKIPM.

Untuk menghitung indeks profesionalitas ASN ini, pengolahan data diambil dari database kepegawaian SIMPEG Online KKP dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

1. Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, Disiplin
2. Kualifikasi diukur dari indikator riwayat Pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi Pendidikan S-3 (Strata-Tiga), Pendidikan S-2 (Strata-Dua), Pendidikan S-1 (Strata-Satu)/ D - 4 (Diploma empat), Pendidikan D3 (Diploma- Tiga)/ SM (Sarjana Muda), Pendidikan D-1 (Diploma-Satu)/D-2 (Diploma-Dua)/ SLTA Sederajat, Pendidikan di bawah SLTA
3. Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional/Diklat Teknis,

Diklat 20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dan Seminar/Workshop/Konferensi/Setara satu tahun terakhir

Pada triwulan IV 2024 indikator ini ditetapkan 86 dan telah terealisasi menjadi 89.97 sehingga capaiannya menjadi 104,616

IKU 7. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup balai KIPM Manado

Nilai penilaian mandiri SAKIP adalah salah satu indikator Kinerja Utama pada tahun 2024. Aspek-aspek yang digunakan untuk menghitung nilai ini adalah:

1. Aspek Kepatuhan dinilai dari kepatuhan penyiapan dan penyampaian dokumen oleh unit kerja (bobot 30%)
2. Aspek Kesesuaian, dinilai dari kesesuaian dengan kriteria yang telah ditetapkan (bobot 30%)
3. Aspek Ketercapaian, dinilai dari Pencapaian Kinerja unit kerja (NPSS pada aplikasi kinerjaku) (bobot 40%)

Tahun 2024 Target yang ditetapkan oleh Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Manado adalah 82 dan telah terealisasi 83.40 sehingga capainnya menjadi 101.70

IKU 8. Persentase Penyelesaian temuan BPK Lingkup BPPMHKP Manado

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK BKIPM merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (adequate disclosure), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern

Pada Tahun 2024 nilai indikator ini ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 100 sehingga capaiannya menjadi 100.

IKU 9. Inovasi Pelayanan public yang diterapkan pada unit kerja lingkup UPT Balai KIPM Manado (Inovasi)

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2021, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinil dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

Kriteria Inovasi: memiliki kebaruan, efektif, bermanfaat, dapat ditransfer/direplikasi, berkelanjutan

Kelompok inovasi: umum, khusus

Aspek penilaian Kelompok Umum: ringkasan (5%), ide inovatif (20%), Signifikansi (25%), Kontribusi terhadap capaian TPB (5%), Adaptabilitas (20%), keberlanjutan (20%), Kolaborasi pemangku kepentingan (5%)

Aspek penilaian Kelompok Khusus: Pembaruan/Peningkatan inovasi (25%), Adaptabilitas (20%), Penguatan keberlanjutan (25%), Evaluasi (30%)

Persyaratan inovasi: memenuhi seluruh kriteria inovasi; selaras dengan tema kompetisi; relevan dengan salah satu kategori kompetisi dan kelompok inovasi, diajukan dalam bentuk proposal dan disertai dokumen pendukung; menggunakan judul yang menggambarkan inovasi dengan memperhatikan norma dan kepatutan.

IKU inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Lingkup UPT BPPMHKP, dengan ukuran sebagai berikut:

- a. Eselon 2 yang ditetapkan oleh Unit Eselon I untuk mengajukan proposal inovasi kepada Tim Penilai Eselon I.
- b. Target hasil : Jumlah proposal unit kerja level 2 yang ditetapkan dalam BA penilaian oleh Tim Penilai Eselon I.

Pada Triwulan IV Indikator ini ditargetkan 1 dan telah terealisasi 1 sehingga capaiannya menjadi 100.

IKU 10. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPPMHKP Lingkup Balai BPPMHKP Manado.

IKPA adalah indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/ Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Nilai ini diperoleh dari data input dan output setiap Satuan Kerja lingkup BPPMHKP didalam aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan. Cara menghitung indikator tersebut dengan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan No. 195/PMK.05/2018 tentang Monev Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L. Evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Permenkeu 195/2018 diwujudkan dalam bentuk pengukuran kualitas kinerja menggunakan IKPA. Berdasarkan Surat Dirjen Perbendaharaan S-258/PB/2020.

Pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran yang dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel yang terkait dengan pelaksanaan anggaran sebagai indikatornya, yaitu pengelolaan uang persediaan, data kontrak, kesalahan SPM, retur SP2D, halaman III DIPA, revisi DIPA, penyelesaian tagihan, rekon LPJ, renkas, realisasi, pagu minus dan dispensasi SPM.

Pada triwulan IV Tahun 2024 ditargetkan 93.76 dan telah terealisasi 97.75 sehingga capaiannya menjadi 104.255.

IKU 11. Nilai Perencanaan Kinerja Anggaran Lingkup BPPMHKP Manado.

Nilai Kinerja Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

Target Akhir Tahun Anggaran 2024 Level 0 (K/L) 82,00 Kategori Nilai Kinerja Anggaran dibagi menjadi 5 (lima), antara lain:

1. Sangat Baik, apabila NKA > 90;
2. Baik, apabila NKA >80 – 90;
3. Cukup, apabila NKA >60 – 80;
4. Kurang, apabila NKA >50 – 60;
5. Sangat Kurang, apabila NKA ≤ 50

Nilai Indikator ini pada triwulan IV tahun 2024 mempunyai target 71 dan telah terealisasi sebesar 90 sehingga capaiannya menjadi 126.76

IKU 12. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/jasa BPPMHKP Lingkup BPPMHKP Manado.

Indikator ini merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengadaan barang dan jasa lingkup UPT BPPMHKP Manado yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat kepatuhan Pengadaan barang dan jasa diukur berdasarkan jumlah nilai dari Rencana Umum pengadaan yang telah di upload ke dalam aplikasi SIRUP (20%) Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%), laporan penyelenggaraan Pengadaan barang dan jasa (20%) serta kesesuaian tahap pelaksanaan (30%)

Nilai Indikator Tingkat kepatuhan pengadaan barang dan jasa BPPMHKP lingkup BPPMHKP pada triwulan IV tahun 2024 ini ditargetkan 80 dan telah terealisasi menjadi 91.98 sehingga capaiannya menjadi 114.975.

IKU 13. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Balai KIPM Manado

Indikator Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN BPPMHKP Lingkup BPPMHKP Manado merupakan suatu ukuran yang menggambarkan kepatuhan pengelolaan BMN yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indikator ini diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur yaitu:

- I. Tingkat pemamfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2024 (bobot 10%.

2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan IV tahun 2024 (baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 20%))
3. Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi asset) Tahun 2017 – 2023 (bobot 20%)
4. Pemamfaatan BMN dan hasil pengadaan belanja modal tahun 2024 didukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara pemakaian (bobot 25%)
5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (Bobot 20%)

Untuk Triwulan IV Tahun 2024 Target nilai indikator tingkat kepatuhan pengelolaan BMN BKIPM lingkup Balai KIPM Manado 80 dan telah terealisasi sebesar 97.50 sehingga capainnya menjadi 121,875.

IKU 14. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja.

Definisi IKU ini adalah persentase rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun Bab) yang terbit pada Triwulan IV tahun 2023

s.d Triwulan IV Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Balai KIPM Manado yang menjadi objek pengawasan.

Realisasi pada triwulan IV tahun 2024 adalah 100% dari target 80% atau tercapai 120%

REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran untuk mendukung tugas dan fungsi BPPMHKP Manado Tahun 2024 sebesar Rp. 6.915.758,- dan pada triwulan IV Tahun 2024 sudah terealisasi Sebesar Rp 6.837.710.972,- atau mencapai 98.84%. disajikan pada tabel 4.

**Tabel 4. Realisasi Anggaran per Jenis Kegiatan Triwulan IV
Tahun 2024**

Jenis Belanja	Pagu DIPA (Rp)	Realisasi DIPA	Prosentase (%)
Belanja Pegawai (51)	3.421.248.000	3.421.596.261	99.72
Belanja barang (52)	3.484.510.000	3.416.114.711	98.04
Belanja Modal (53)	0	0	0
Total	6.915.758.000	6.837.710.972	98.84

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Balai KIPM Manado Triwulan IV Tahun 2024 menyajikan perkembangan capaian sasaran kegiatan Balai KIPM Manado selama dan/atau sampai triwulan IV tahun 2024 yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Manajerial (IKM).

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan atas capaian dan akuntabilitas kinerja Triwulan IV 2024, dari 14 Indikator Kinerja Utama BPPMHKP Manado yang telah ditetapkan, berdasarkan hasil pengukuran kinerja, semua indikator capaiannya sesuai dan Secara umum, rata-rata capaian indikator kinerja Balai KIPM Manado pada Triwulan IV 2024 sesuai dengan target. Yang berarti capaian kinerja Balai KIPM Manado di Triwulan IV 2024 boleh dikatakan baik.

Pada triwulan IV tahun 2024 yaitu bulan Oktober, terkait SOTK baru BPPMHKP sehingga terjadi perubahan tugas dan fungsi BPPMHKP, maka terjadi perubahan beberapa indikator kinerja baik dalam hal uraian ataupun targetnya. Sehingga mengakibatkan perubahan dokumen kinerja terutama Perjanjian Kinerja yang mengalami revisi pada bulan Oktober 2024.

Pada Perjanjian Kinerja (PK) sebelumnya jumlah indikator kinerja kegiatan berjumlah 17 IKU. Setelah mengalami revisi jumlah indikator menjadi 14 IKU. Dari 15 indikator kinerja di tahun 2024 tersebut seluruh pencapaiannya memenuhi dan/atau melebihi target.

Realisasi PNBK tahun 2024 dapat mencapai target walaupun adanya reorganisasi BKIPM menjadi BPPMHKP dan terjadi pengurangan PNBK karena penarikan PNBK untuk BKHIT yang merupakan PNBK Karantina

Demikian Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2024 Balai KIPM Manado disusun. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta pengukuran kinerja di lingkup Balai KIPM Manado dan data dukung pengukuran kinerja di BPPMHKP dan diharapkan dapat menjadi pertanggung jawaban tertulis kepada pemangku kepentingan serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan sehingga terbentuknya pemerintahan yang baik (*good governance*). Selain itu,

laporan ini juga diharapkan jadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (*Operation plan*), Rencana Kinerja (*Performance plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*) Strategic Plan) di lingkungan BPPMHKP Manado di masa mendatang.



LAMPIRAN



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAM HYPERLINK "http://www.kkp.go.id" www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN
HASIL PERIKANAN MANADO

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Muhlin**
Jabatan : Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Manado

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ishartini**
Jabatan : Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 01 Oktober 2024

Pihak Kedua

Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan

Ishartini

Pihak Pertama

Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian
Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Manado

Muhlin

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN
HASIL PERIKANAN MANADO

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai KIPM Manado (%)	70
		2	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai KIPM Manado (%)	70
		3	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup Balai KIPM Manado (%)	99
SK.2	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4	Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi lingkup Balai KIPM Manado (%)	70
SK.3	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup UPT Balai KIPM Manado	5	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja lingkup Balai KIPM Manado (Inovasi)	1
		6	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Balai KIPM Manado (Indeks)	3,36
		7	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Balai KIPM Manado (Indeks)	86
		8	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Balai KIPM Manado (Nilai)	82
		9	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Balai KIPM Manado (Nilai)	71
		10	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Balai KIPM Manado (Nilai)	93,76
		11	Persentase Penyelesaian temuan BPK Lingkup Balai KIPM Manado (%)	100
		12	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai KIPM Manado (%)	80
		13	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Balai KIPM Manado (%)	80
		14	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Balai KIPM Manado (%)	80

Data Anggaran

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	6,225,660,000
3.	Manajemen Mutu	121,000,000
4.	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	365,000,000
Total Anggaran Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Manado Tahun 2024		6,711,660,000

Jakarta, 01 Oktober 2024

Pihak Kedua

Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan



Ishartini

Pihak Pertama

Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian
Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Manado



Muhlin



PAGU DAN REALISASI BELANJA

Bulan : 01 s.d. 12

No	BA-Satker	Nama Satker	KPPN	Ket	Jenis Belanja									Total
					Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	Bansos	Lain-lain	Transfer	
1	032-567631	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MANADO	049	PAGU	3,431,248,000	3,484,510,000	0	0	0	0	0	0	0	6,915,758,000
				REALISASI	3,421,596,261	3,416,114,711								6,837,710,972
				PERSENTASE	(99.72%)	(98.04%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	(98.87%)
				SISA	9,651,739	68,395,289	0	0	0	0	0	0	0	78,047,028
TOTAL				PAGU	3,431,248,000	3,484,510,000	0	0	0	0	0	0	0	6,915,758,000
				REALISASI	3,421,596,261	3,416,114,711								6,837,710,972
				PERSENTASE	(99.72%)	(98.04%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(98.87%)
				SISA	9,651,739	68,395,289	0	0	0	0	0	0	0	78,047,028
Disclaimer: Realisasi berbasis kas dan bersifat netto (memperhitungkan pengembalian belanja sebagai pengurang realisasi) sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Laporan Ketersediaan Dana (FA)														

Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai KIPM Manado

CARA PENGUKURAN

$$\%X = \frac{A+B+C+D+E+F}{xn} \times 100\%$$

%X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan

A = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CBIB

B = Persentase Unit menerapkan CPIB

C = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CPPIB

D = Persentase Unit Usaha menerapkan CPOIB

E = Persentase Unit Usaha menerapkan CPOIB

F = Persentase Unit Usaha menerapkan CPIB Kapal

xn = Jumlah dari unsur pembentuk (6)*)

Unsur pembentuk : **Persentase Unit Usaha menerapkan CPIB Kapal**

Capaian : 2 Sertifikat CPIB

Target :

$$\begin{aligned}\% \text{CPIB Kapal} &= \frac{\text{jumlah sertifikat}}{\text{target sertifikat}} \times 100\% \\ &= \frac{1}{1} \times 100\% \\ &= 100\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\%X &= \frac{A+B+C+D+E+F}{xn} \times 100\% \\ &= \frac{100}{1} \times 100\% \\ &= 100\%\end{aligned}$$

Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai KIPM Manado

CARA PENGUKURAN

$$\%X = \frac{A+B}{xn} X 100\%$$

%X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan

A = Presentase Penerbitan Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk

B = Persentase SKP yang diterbitkan di Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan menengah besar yang menerapkan GMPSSOP

xn = Jumlah dari unsur pembentuk (2)

Unsur pembentuk :

$$A \text{ (HACCP) } : \frac{95}{90} X 100\%$$

: 105,5 %

B (SKP) : 91,67 %

$$\begin{aligned}\%X &= \frac{A+B}{xn} X 100\% \\ &= \frac{105,5+91,67}{2} X 100\% \\ &= \mathbf{98,58\%}\end{aligned}$$



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAM www.kkp.go.id

Nomor : B.32/BPPMHKP.2/TU.210/I/2025 10 Januari 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Penyampaian Capaian IKU Sistem
Manajemen Mutu Laboratorium Penguji dan
Lembaga Inspeksi lingkup UPT BPPMHKP

Yth. Seluruh Kepala UPT BPPMHKP

Sehubungan telah selesainya kegiatan Tahun Anggaran 2024, bersama ini kami sampaikan capaian indikator kinerja utama terkait nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan lembaga inspeksi lingkup UPT BPPMHKP, sebagai berikut:

1. Capaian indikator kinerja utama Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium sebesar **81,35** didapatkan dari 13 laboratorium;
2. Capaian indikator kinerja utama Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi sebesar **84,85** didapatkan dari 14 lembaga inspeksi;
3. Berdasarkan data pada poin 1 dan poin 2 maka capaian indikator kinerja utama Nilai Pemenuhan Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Penguji dan Lembaga Inspeksi Lingkup UPT BPPMHKP sebesar **83,10**.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Manajemen Mutu



Ditandatangani
Secara Elektronik

Woro Nur Endang Sariat

Tembusan:

1. Kepala Badan Penegndalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
2. Sekretaris Badan Penegndalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

Penanggung Jawab IKU

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dolly N. Rawung', written over the printed name.

Dolly N. Rawung S.St.Pi
NIP. 197911052002122003

Proposal

Transformasi Digital Layanan Terintegrasi: Inovasi Fin Tuna (Fasilitas Inovasi Teknologi Untuk layanan) BKIPM Manado

Ringkasan



Fin Tuna (Fasilitas Inovasi Teknologi untuk Layanan) adalah inovasi digital dari BKIPM Manado yang memudahkan proses sertifikasi ekspor perikanan secara daring. Aplikasi ini dirancang untuk mengurangi birokrasi dan mempercepat proses administrasi, sehingga pelaku usaha tidak perlu hadir langsung di kantor BKIPM. Dengan Fin Tuna, layanan sertifikasi tetap berjalan lancar, mendukung efisiensi dan pertumbuhan ekspor.

Fin Tuna berperan penting dalam menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan sektor perikanan Indonesia, khususnya bagi pelaku usaha ekspor. Terbukti, meski dalam situasi menantang, aplikasi ini mampu menjaga kelancaran proses sertifikasi ekspor. Data menunjukkan, meski ada sedikit penurunan nilai ekspor pada 2020, pada tahun 2021 nilai ekspor mencapai 124.041.881,65 USD, kemudian melonjak menjadi 165.654.067,68 USD pada 2022 dan 167.407.778,13 USD pada 2023. Fin Tuna bukan hanya memastikan proses sertifikasi yang efisien, tetapi juga menjadi solusi teknologi yang adaptif dan inovatif, membantu pelaku usaha terus berkembang di industri perikanan.

Ide Inovatif

Latar Belakang

Sulawesi Utara dikenal sebagai salah satu provinsi dengan potensi perikanan tangkap yang melimpah di Indonesia. Dengan potensi perikanan mencapai 242.562 ton per tahun, provinsi ini melibatkan sekitar 57.774 individu dari berbagai sektor, termasuk unit pengolahan ikan, pemasok, nelayan, dan pembudidaya yang tersebar di 12 kabupaten/kota. BKIPM Manado, sebagai UPT di bawah Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan – Kementerian Kelautan dan Perikanan, memiliki peran penting dalam menjamin mutu dan keamanan produk perikanan melalui proses sertifikasi. Pada tahun 2018, volume hasil perikanan yang disertifikasi oleh BKIPM Manado mencapai 22.037.569 kg dengan nilai 133.782.774,29 USD, dan meningkat pada tahun 2019 menjadi 24.833.476,46 kg dengan nilai 144.886.092,93 USD. Namun, menghadapi tantangan logistic, dan adanya pandemi Covid 19 pada saat itu dan perubahan kondisi pasar, BKIPM Manado menyadari perlunya inovasi dalam proses sertifikasi dan pelayanan. Menjawab

kebutuhan ini, BKIPM Manado meluncurkan aplikasi Fin Tuna , sebuah inisiatif digitalisasi yang terintegrasi. Fin Tuna dirancang untuk mempermudah dan mempercepat proses sertifikasi ekspor, serta meningkatkan aksesibilitas bagi pelaku usaha perikanan di Sulawesi Utara. Inovasi ini tidak hanya memfasilitasi layanan yang lebih efisien, tetapi juga mendukung keberlanjutan ekonomi bagi masyarakat yang bergantung pada industri perikanan. Dengan demikian, Fin Tuna merupakan langkah strategis BKIPM Manado dalam memajukan sektor perikanan daerah dan memperkuat daya saing produk perikanan Indonesia di pasar global.

Tujuan

Aplikasi Fin Tuna dirancang untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha eksportir produk perikanan dalam mendapatkan sertifikat kesehatan (HC) dengan cepat dan efisien. Dengan mengadopsi teknologi digital, BKIPM Manado memastikan proses sertifikasi menjadi lebih praktis dan mudah diakses, mengurangi kebutuhan pertemuan tatap muka antara petugas dan pelaku usaha. Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi layanan, mempercepat proses ekspor, serta mendorong pertumbuhan ekspor produk perikanan dari Sulawesi Utara. Dengan aplikasi ini, diharapkan iklim usaha perikanan akan semakin kondusif dan kompetitif, mendukung pertumbuhan ekonomi regional secara berkelanjutan.

Sisi Kebaruan atau Nilai Tambah Inovasi

Aplikasi Fin Tuna merupakan terobosan digital yang sepenuhnya merevolusi pelayanan sertifikasi produk perikanan di BKIPM Manado. Sebelumnya, pelaku usaha harus datang langsung ke kantor BKIPM Manado untuk melakukan pembayaran dan mengambil sertifikat kesehatan (HC), yang mengharuskan mereka menempuh jarak ± 48 km dari Bitung dan membuang waktu serta biaya tambahan. Jam pelayanan yang terbatas dari pukul 08:00 hingga 16:00 WITA juga menjadi kendala, terutama bagi produk segar yang rentan terhadap penurunan mutu. Fin Tuna menghadirkan solusi dengan digitalisasi layanan terintegrasi yang beroperasi 24 jam nonstop. Aplikasi ini memungkinkan pelaku usaha menyelesaikan seluruh proses sertifikasi secara online, termasuk pembayaran PNBP melalui Mobile Banking, ATM, atau e-commerce. Sertifikat HC dapat langsung diambil di cargo bandara, menghilangkan kebutuhan untuk datang ke kantor BKIPM. Dengan Fin Tuna, proses sertifikasi menjadi lebih cepat, efisien, dan fleksibel, tanpa terhambat oleh jarak atau jam operasional. Inovasi ini tidak hanya memudahkan pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan ekspor, tetapi juga meningkatkan efisiensi operasional BKIPM Manado. Fin Tuna menghilangkan hambatan logistik dan birokrasi, memungkinkan eksportasi produk perikanan tetap berjalan lancar. Bukti keberhasilan aplikasi ini terlihat dari stabilnya nilai ekspor, dengan penurunan minimal hanya 8,8% dari 2019 ke 2020. Pada tahun-tahun berikutnya, nilai ekspor justru meningkat pesat, mencapai 165.654.067,68 USD pada tahun 2022 dan 167.407.778,13 USD pada tahun 2023, menunjukkan ketahanan sektor ini meskipun menghadapi berbagai tantangan. Fin Tuna tidak hanya menjawab kebutuhan masa kini, tetapi juga membuka peluang baru untuk pengembangan lebih lanjut di masa depan.

Inovasi ini memungkinkan :

- Permohonan online
- Layanan informasi dan konsultasi virtual
- Hasil Pengujian online
- Pembayaran online
- Layanan live chat
- Real time dashboard informasi lalu lintas ekspor dan domestic keluar

Signifikansi

Deskripsi Implementasi Inovasi

Aplikasi Fin Tuna adalah inovasi digital dari BKIPM Manado yang mengintegrasikan seluruh layanan sertifikasi dan informasi dalam satu platform. Aplikasi ini mencakup berbagai kebutuhan seperti sertifikasi online (PPK Online), sertifikasi HACCP (Honest), survei kepuasan masyarakat (SKM Online), pengujian laboratorium (Silabkarimutu), dashboard data lalu lintas, serta layanan konsultasi dan informasi. Dengan akses online 24/7, pengguna dapat menyelesaikan seluruh proses sertifikasi dari rumah atau tempat kerja tanpa perlu hadir di kantor BKIPM Manado. Notifikasi penerbitan sertifikat dan kode billing dikirim melalui aplikasi percakapan yang terintegrasi, mempermudah proses administrasi.

Fin Tuna juga menawarkan layanan konsultasi melalui Go Chat BKIPM Manado dan Go Live BKIPM Manado, memberikan kemudahan bagi pengguna untuk mendapatkan informasi atau menyampaikan pengaduan. Aplikasi ini dapat diunduh di Play Store atau App Store, membuat semua layanan BKIPM Manado dapat diakses dari smartphone. Fin Tuna tidak hanya mempercepat dan mempermudah proses sertifikasi, tetapi juga meningkatkan interaksi antara BKIPM Manado dan pengguna, menciptakan layanan yang lebih responsif dan modern.

Penilaian/ asesmen (evaluasi yang dilakukan)

Untuk memastikan dan meningkatkan kualitas layanan, BKIPM Manado menerapkan dua mekanisme evaluasi yang komprehensif. Pertama, monitoring internal dilakukan setiap bulan sebagai bagian dari pilar peningkatan tata laksana WBK BKIPM Manado. Evaluasi ini mencakup pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi sumber daya manusia, dan pemberian layanan kepada publik. Kedua, survei kepuasan masyarakat dilaksanakan setiap triwulan untuk mendapatkan umpan balik langsung dari pengguna layanan. Hasil dari monitoring internal dan survei ini digunakan sebagai bahan masukan untuk terus mengembangkan dan menyempurnakan aplikasi Fin Tuna. Selain evaluasi internal, BKIPM Manado juga menjalani penilaian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui inspektorat jenderal KKP. Penilaian ini mencakup WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan Indeks Pelayanan Publik, yang dilakukan setiap tahun. Evaluasi eksternal ini memastikan bahwa BKIPM Manado tidak hanya memenuhi standar internal tetapi juga ekspektasi dari kementerian, menjadikan aplikasi Fin Tuna sebagai alat yang andal dan inovatif dalam memberikan layanan sertifikasi perikanan yang efisien dan berkualitas tinggi.

Dampak

Aplikasi Fin Tuna telah memberikan dampak signifikan dalam memfasilitasi pelaku usaha eksportir produk perikanan di BKIPM Manado, terutama dalam hal sertifikasi ekspor. Meskipun dihadapkan pada tantangan besar seperti pembatasan mobilitas, Fin Tuna memungkinkan proses sertifikasi berlangsung lancar dan efisien. Data menunjukkan bahwa volume ekspor pada tahun 2020 hanya turun sedikit sebesar 4,2% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan nilai ekspor mencapai 129.432.794,30 USD. Pada tahun-tahun berikutnya, nilai ekspor justru meningkat pesat, mencapai 165.654.067,68 USD pada tahun 2022 dan 167.407.778,13 USD pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa pengguna jasa tetap dapat melakukan sertifikasi ekspor tanpa hambatan, meskipun dalam situasi sulit. Selain mendukung proses ekspor, aplikasi ini juga berhasil menerbitkan 72 sertifikat HACCP pada tahun 2020, memperkuat standar kualitas produk perikanan yang diekspor. Fin Tuna memfasilitasi konsultasi, penyampaian pengaduan, dan akses informasi secara daring, tanpa perlu tatap muka. Ini tidak hanya membantu menjaga kesehatan dan keselamatan, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan kenyamanan bagi pengguna layanan.

Evaluasi kinerja menunjukkan bahwa inovasi ini mampu menjaga stabilitas pelayanan publik di tengah tantangan. Pada triwulan I tahun 2020, meskipun terjadi penurunan volume ekspor sebesar 10%, total penurunan selama tahun 2020 hanya 2% dibandingkan tahun 2019. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan juga meningkat, dari nilai 82,83 (baik) pada tahun 2019 menjadi 83,71 (baik) pada tahun 2020. Waktu layanan yang semula memakan waktu 3-4 hari kini dipercepat menjadi hanya 0,54 jam, dan biaya operasional menjadi nol berkat eliminasi kebutuhan transportasi dan biaya tambahan lainnya. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa Fin Tuna bukan hanya solusi sementara, tetapi juga inovasi yang efektif dan efisien untuk jangka panjang. Fin Tuna tidak hanya membuktikan ketahanannya dalam menghadapi situasi krisis tetapi juga menjanjikan peningkatan layanan di masa depan, menjadikan proses sertifikasi ekspor lebih cepat, lebih murah, dan lebih mudah diakses.

Adaptabilitas

Aplikasi Fin Tuna dirancang dengan fleksibilitas tinggi, memungkinkan adaptasi yang mudah sesuai dengan kebutuhan dan kendala yang dihadapi di berbagai unit pelaksana teknis (UPT) BKIPM di seluruh Indonesia. Dengan teknologi berbasis web dan aplikasi smartphone, Fin Tuna menawarkan solusi digital yang dapat diakses dengan mudah oleh semua pihak. Implementasinya tidak memerlukan sumber daya dan biaya yang besar, sehingga memudahkan proses replikasi dan pengembangan lebih lanjut. Beberapa UPT BKIPM saat ini sudah menggunakan layanan digital, namun Fin Tuna menawarkan potensi untuk transisi integrasi ke sistem digital secara menyeluruh. Beberapa UPT, seperti SKIPM Ternate dan BKIPM Ambon, sudah melakukan studi banding untuk mengadopsi aplikasi ini. Hal ini menunjukkan bahwa Fin Tuna tidak hanya dapat diadopsi

secara lokal, tetapi juga memiliki potensi untuk diimplementasikan secara nasional. Dengan pengembangan lebih lanjut, Fin Tuna dapat menjadi standar bagi seluruh UPT BKIPM dalam memberikan layanan yang lebih efisien dan responsif. Adaptabilitasnya membuat aplikasi ini ideal untuk diintegrasikan dalam skala yang lebih luas, menjadikan layanan karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan lebih modern dan terkoordinasi di seluruh Indonesia. Ini adalah langkah strategis menuju digitalisasi layanan publik yang lebih baik, yang akan memberikan manfaat besar bagi pelaku usaha dan masyarakat secara keseluruhan.

Sumber Daya

Aplikasi inovatif Fin TUNA di BKIPM Manado dibangun dengan dukungan tim ahli yang terdiri dari fungsional PHPI, inspektur mutu, dan pranata komputer, yang mahir dalam pengembangan perangkat lunak dan jaringan. Selain itu, petugas pelayanan terlatih bertindak sebagai operator aplikasi, memastikan layanan berjalan lancar. Kerja sama dengan perusahaan platform online untuk jasa pembayaran dan pengujian, serta pelaku usaha perikanan sebagai pengguna aplikasi, menciptakan ekosistem yang kuat dan efisien. Inovasi ini didanai oleh anggaran Pusat Standardisasi Sistem dan Kepatuhan BKIPM, dengan alokasi antara Rp. 25.000.000 hingga Rp. 50.000.000 per tahun. Dana tersebut digunakan untuk pemeliharaan server, pengembangan fitur baru, dan kegiatan sosialisasi. Dukungan ini memastikan Fin TUNA terus berkembang, memberikan layanan yang lebih baik, dan memenuhi kebutuhan para pelaku usaha di industri perikanan dengan efektif.

Keberlanjutan

Keberlanjutan inovasi ini dijamin melalui berbagai regulasi dan prosedur standar, seperti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMEN-KP/2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan Perikanan; Keputusan Kepala BKIPM Nomor 82/KEP-BKIPM/2019 tentang Standar Pelayanan Publik Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan; Keputusan Kepala BKIPM Manado Nomor 2913/HM.430/XII/2019 Tanggal 27 Desember 2019 tentang Prosedur Standar Operasional Sistem Layanan Online (Fast Track BKIPM Mamado) dan Kemudian disempunakan dengan Keputusan Kepala BKIPM Manado Nomor 2811/KP.430/XII/2019 Tanggal 12 Desember 2019 tentang Prosedur Standar Operasional Digitalisasi Sistem Layanan (Fin TUNA BKIPM Mamado) digunakan untuk menjamin keberlangsungan inovasi ini. Strategi ini memastikan bahwa Fin TUNA tidak hanya memenuhi standar pelayanan publik yang ada tetapi juga terus berkembang seiring dengan kebutuhan dan tantangan baru. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dilakukan melalui pelatihan dan sosialisasi kepada operator aplikasi dan pengguna layanan. Selain itu, penerapan standar operasional prosedur (SOP) dan sertifikasi ISO 9001:2015 memastikan bahwa kualitas pelayanan tetap terjaga. Kepuasan masyarakat diukur secara triwulanan melalui survei dengan hasil yang menunjukkan kategori "BAIK", sebagai indikator keberhasilan pelayanan.

Sejak diperkenalkan sebagai Fast Track dan kemudian diubah menjadi Fin TUNA untuk mempermudah pengenalan brand, inovasi ini telah diadopsi secara luas. Nama "Fin TUNA" diambil dari ikan tuna yang dikenal cepat berenang, melambangkan kecepatan dan efisiensi layanan BKIPM Manado, sekaligus mengakui komoditas andalan Sulawesi Utara. Inovasi ini telah diadaptasi untuk merespon berbagai kondisi, termasuk pembatasan sosial saat

pandemi, dan disosialisasikan kepada berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, dinas perikanan, dan instansi terkait lainnya.

Arahan Presiden RI pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 18 Juni 2020 mengenai percepatan pelayanan publik di era new normal menjadi landasan bagi Fin TUNA untuk terus berinovasi dan bertahan dalam memberikan layanan publik yang berkualitas. Keterlibatan aktif masyarakat dalam memberikan umpan balik terhadap layanan ini juga menjadi faktor kunci dalam peningkatan berkelanjutan, memastikan bahwa Fin TUNA terus relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan masa depan.

KOLABORASI PEMANGKU KEPENTINGAN

1. **Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan** sebagai penerbit Surat Keputusan tentang Standar Pelayanan Publik;
2. **Pusat Standardisasi Sistem dan Kepatuhan** sebagai penanggungjawab Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik BKIPM;
3. **Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Manado**
4. **PT. Fintek Karya Nusantara** sebagai penyedia jasa e money Link Aja sebagai pembayaran e money;
5. **Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan** sebagai perwakilan pelaku usaha dalam pengurusan sertifikat.
6. **Pelaku Usaha Perikanan** selaku pengguna jasa layanan yang berperan aktif dalam pengisian survei kepuasan pelanggan, serta memberikan kritikan dan masukan untuk perbaikan layanan publik.

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

NOTA DINAS
NOMOR 3374/SJ.7/TU.210/IX/2024

Yth. : 1. Para Sekretaris Direktorat Jenderal/ Badan dan
2. Inspektur I,II,III,IV
Dari : Kepala Pusat Data Statistik, dan Informasi
Hal : Penyampaian Berita Acara Pleno Penilaian Proposal Inovasi
Pelayanan Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun
2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Tanggal : 5 September 2024

1. Menindaklanjuti telah selesainya kegiatan penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 dan telah disahkannya Berita Acara Pleno Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik pada kegiatan yang dilaksanakan tanggal 7 s.d 9 Agustus 2024 di Hotel Santika Batam Jl. Engku Putri No.9, Tlk. Tering, Batam Center, Kota Batam, Kepulauan Riau 29464 kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
- a) Tim Penilai Kementerian Kelautan dan Perikanan mendapat sebanyak 61 proposal inovasi pelayanan publik. Masing-masing proposal dinilai oleh 2 (dua) penilai dan berdasarkan pleno penilaian, Tim penilai memilih 15 proposal inovasi terbaik yaitu:

No	Eselon I	Nama UPP	Nama Inovasi
1	DJPT	Balai Besar Penangkapan Ikan	BULIK MANIS IDAMAN NELAYAN (Bubu Lipat Ikan Mantap dan Istimewa Idaman Nelayan)
2	DJPKRL	Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru	KADO SPESIAL (Kawasan Bando Spesifik Konservasi Alam Laut)
3	DJPDSPKP	Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan	INVAPRO KAPE (Inkubasi Bisnis Inovasi Produk Kelautan dan Perikanan)
4	DJPT	Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	TERJALA (Integrasi Pelayanan Jasa dan Pengolahan Data)
5	BPPMHKP	Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Pangkal Pinang	JAGA SI CEKATAN (Jejaring Gabungan Reaksi Cepat Kelautan dan Perikanan) Inovasi Non Digital Cepat Viral

6	DJPT	Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang	SELASIH (Sistem Informasi Pelayanan Air Bersih)
7	DJPB	Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang	SiPATIN (Sistem Pelayanan Terintegrasi)
8	BPPMHKP	Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Mataram	Si Chupang New (Aplikasi Cukup Mudah dan Gampang New)
9	DJPT	Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpan dan	SILAUT (Sistem Integrasi Layanan Usaha Terpadu)
10	DPSDKP	Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahuna	UBI KUPAS (Laut Bersih, Kumpul Sampah dan Plastik)
11	DJPKRL	Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang	Taman Karang Piracora
12	DJPDSPKP	Dit. Pemasaran	KURAS IKAN (Kurasi Produk Perikanan Untuk UMKM Naik Kelas)
13	BPPSDM	Politeknik KP Sidoarjo	Aplikasi PENTARU: Penerimaan Taruna Baru (Efektif, Efisien, Transpran)
14	DJPB	BPBAP Takalar	Bibit Rumput Laut Kualitas Unggul (Biru LautKu)
15	BPPSDM	BDA Sukamandi	<i>Learning Management System Electronic Millenial Learning (E-MILEA)</i>

- b) Proposal yang menjadi top 15, kami ajukan untuk mendapat penghargaan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan pada kegiatan Adi Bakti Mina Bahari;
- c) Seluruh Unit Pelayanan Publik yang telah mengajukan proposal inovasi kepada tim penilai baik level 2 maupun 1, dapat mengunduh sertifikat sebagai peserta Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 melalui link berikut: <https://bit.ly/sertifikipp24>;
- d) Secara umum dapat kami sampaikan hasil penilaian atas 61 Proposal sebagai berikut:

No	Eselon I	Jumlah Proposal yang disubmit	Target	Realisasi IKU	Persentase Capaian (%)
1.	DJPKRL	4 Proposal	76	84.26	110.87
2.	DJPT	6 Proposal	76	87.31	114.88
3.	DJPB	14 Proposal	76	76.07	100.10
4.	DJPDSPKP	5 Proposal	76	85.26	112.18
5.	DJPSDKP	8 Proposal	76	81.13	106.75
6.	BPPSDMKP	12 Proposal	76	80.24	105.57
7.	BPPMHKP	12 Proposal	76	80.31	105.68
Total		61 Proposal	76	80.78	106.30

Keterangan:

Nilai yang diinput pada aplikasi kinerjaku adalah realisasi IKU

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Aulia Riza Farhan

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal dan
2. Inspektur Jenderal.



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351
LAMAM www.kkp.go.id SUREL setjen@kkp.go.id

BERITA ACARA HASIL SIDANG PLENO
PENILAIAN PROPOSAL INOVASI PELAYANAN PUBLIK
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024

Nomor : B.893/SJ/TU.220/VIII/2024

Tanggal : 09 Agustus 2024

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **Sembilan** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** (09-08-2024), telah dilaksanakan Rapat Pleno Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 yang dilaksanakan secara luring di Hotel Santika Batam. Kami selaku Tim Penilai Inovasi Pelayanan Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024, sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Tim Penilai Inovasi Pelayanan Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024, telah melakukan penilaian terhadap proposal inovasi pelayanan publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Terdapat 61 (enam puluh satu) proposal inovasi yang diajukan oleh Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini:

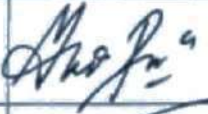
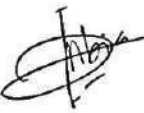
No	Eselon I	Unit Pelayanan Publik	Judul Inovasi
1	DJPKRL	Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang	Gerei Pelayanan Sini Situ
2	DJPKRL	LKKPN Pekanbaru	KADO SPESIAL (Kawasan Bando Spesifik Konservasi Alam Laut)
3	DJPKRL	Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang	Sila Dalipatik "Aksi Kolaboratif Pengendalian Sampah Plastik"
4	DJPKRL	Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang	Taman Karang Piracora
5	DJPT	BBPI	BULIK MANIS IDAMAN NELAYAN (Bubu Lipat Ikan Mantap dan Istimewa Idaman Nelayan)

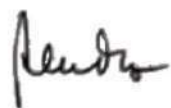
No	Eselon I	Unit Pelayanan Publik	Judul Inovasi
			Ikan Berbasis Resiko, Post Audit dan Terintegrasi)
29	DJPDSPKP	Dit. Pemasaran	KURAS IKAN (Kurasi Produk Perikanan Untuk UMKM Naik Kelas)
30	DPSDKP	Direktorat Pemantauan Operasi Armada	Kartu SALMON (Sistem Aktivasi Lacak dan Monitor)
31	DPSDKP	Sekretariat Direktorat Jenderal	SI IKAN GABUS (Sistem Informasi kenalkan Gaji Berkala Untuk pegawai Sejahtera)
32	DPSDKP	Pangkalan PSDKP Jakarta	SIPINTER (Sistem Pelayanan Informasi Terpadu)
33	DPSDKP	Stasiun PSDKP Cilacap	CEKATAN (Cek Kapal Tanpa Antrean) Lebih Dekat, Lebih Cepat di Stasiun PSDKP Cilacap
34	DPSDKP	Stasiun PSDKP Belawan	SILVER (Sistem Informasi LVHPI Terpadu)
35	DPSDKP	Stasiun PSDKP Tahuna	UBI KUPAS (Laut Bersih, Kumpul Sampah dan Plastik)
36	DPSDKP	Stasiun PSDKP Ambon	SAMANDAR (Sistem Perencanaan, Monitoring dan Pelaporan secara Daring) Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
37	DPSDKP	Stasiun PSDKP Biak	Biak GO Link (Web Site Pelayanan Satu Link yang Dapat Mengakses Semua Web yang Digunakan Pelaku Usaha/Pengurus Kapal)
38	BPPSDMKP	LPTK	SI MARIBAJA (Sistem Informasi Kelautan untuk Nelayan Tradisional)
39	BPPSDMKP	BRBIH	LOCA FEED: Low Carbon Feed
40	BPPSDMKP	BP3 Medan	SIAPP BOSS: Sarana Informasi Aksi Pelayanan Publik BPPP Medan One Stop Service
41	BPPSDMKP	BP3 Ambon	Tabea Pelaut: Tanpa Biaya dan Antrean Lama Pendaftaran Pelatihan Kepelautan
42	BPPSDMKP	BP3 Banyuwangi	SI PANDA Aplikasi Pemeriksaan Buta Warna Digital)
43	BPPSDMKP	BP3 Bitung	BPPP Bitung <i>Mobile</i>
44	BPPSDMKP	BP3 Tegal	SILANGIT: Sistem Informasi Layanan Terintegrasi
45	BPPSDMKP	Politeknik KP Bitung	PIOnS: <i>Polytechnic Integrated Online System</i>
46	BPPSDMKP	SUPM Ladong	SIUSUPM: Sistem Ujian Sekolah Usaha Perikanan Menengah
47	BPPSDMKP	BPPSDM	SFV (SMART Fisheries Village)

2. Telah dilakukan penilaian proposal inovasi pelayanan publik Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2024 dan pengusulan pemberian penghargaan bagi inovasi yang menjadi Top 15 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini:

No	Eselon I	Nama UPP	Nama Inovasi
1	DJPT	Balai Besar Penangkapan Ikan	BULIK MANIS IDAMAN NELAYAN (Bubu Lipat Ikan Mantap dan Istimewa Idaman Nelayan)
2	DJPKRL	Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru	KADO SPESIAL (Kawasan Bando Spesifik Konservasi Alam Laut)
3	DJPDSPKP	Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan	INVAPRO KAPE (Inkubasi Bisnis Inovasi Produk Kelautan dan Perikanan)
4	DJPT	Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	TERJALA (Integrasi Pelayanan Jasa dan Pengolahan Data)
5	BPPMHKP	Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Pangkal Pinang	JAGA SI CEKATAN (Jejaring Gabungan Reaksi Cepat Kelautan dan Perikanan) Inovasi Non Digital Cepat Viral
6	DJPT	Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang	SELASIH (Sistem Informasi Pelayanan Air Bersih)
7	DJPB	Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang	SiPATIN (Sistem Pelayanan Terintegrasi)
8	BPPMHKP	Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Mataram	Si Chupang New (Aplikasi Cukup Mudah dan Gampang New)
9	DJPT	Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpan dan	SILAUT (Sistem Integrasi Layanan Usaha Terpadu)
10	DPSDKP	Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahuna	UBI KUPAS (Laut Bersih, Kumpul Sampah dan Plastik)
11	DJPKRL	Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang	Taman Karang Piracora
12	DJPDSPKP	Dit. Pemasaran	KURAS IKAN (Kurasi Produk Perikanan Untuk UMKM Naik Kelas)
13	BPPSDM	Politeknik KP Sidoarjo	Aplikasi PENTARU: Penerimaan Taruna Baru (Efektif, Efisien, Transparan)

MENYETUJUI,
TIM PENILAI INOVASI PELAYANAN PUBLIK
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024

NO	NAMA	KEDUDUKAN	TANDA TANGAN
1	Aulia Riza Farhan, S.T., M.Sci.Tech., Ph.D, PIt: Kepala Pusat Data, Statistik, dan Informasi	Ketua	
2	Mareta Nirmalanti, S.Pi, M.Si, Perencana Madya Pusat Data, Statistik, dan Informasi	Sekretaris	
3	Yudi Priatno, B.ENG, M.S.E, Pranata Komputer Ahli Madya, Pusat Data, Statistik, dan informasi, Sekretariat Jenderal	Anggota	
4	Mohamad Armansyah, S.T., MAP, Pranata Komputer Ahli Madya, Pusat Data, Statistik, dan Informasi, Sekretariat Jenderal	Anggota	
5	Supriyatun, S.St.Pi., M.A.B., Analis Kebijakan Muda, Pusat Data, Statistik, dan Informasi	Anggota	
6	Srianto, S.Pi., M.Ak, Auditor Muda, Inspektorat II	Anggota	
7	Reva Nathalie Imanda, S.E., Auditor Pertama, Inspektorat II	Anggota	
8	Dini Wulansari S.Pi, Analis Pelayanan, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut	Anggota	
9	Sukmarumaeti, S.Pi, M.M, Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Madya, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	Anggota	
10	Ambia Rachman Haryadi, S.Kom., MMSI., Analis Organisasi, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	Anggota	
11	Dian Lestari Pujiastuti, S.St.Pi., M.M, Perencana Ahli Madya, Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	Anggota	
12	Purihitajati Widodo, S.H., M.H., Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Muda, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Anggota	
13	Kasmawati, SS, Pranata Humas Muda, Sekretariat Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Anggota	

NO	NAMA	KEDUDUKAN	TANDA TANGAN
14	Endro Aribowo, S.E, PHPI Madya, Pusat Standardisasi Sistem dan Kepatuhan Badan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	Anggota	
15	Hendri,, S.Pi., M.Si Pusat Standardisasi Sistem dan Kepatuhan Badan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	Anggota	
16	Martono, S.Pi, Pusat Standardisasi Sistem dan Kepatuhan, Badan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	Anggota	

Mengetahui,
 Penanggung Jawab Tim Penilai
 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2024
 Sekretaris Jenderal



**Ditandatangani
 Secara Elektronik**

Rudy Heriyanto Adi Nugroho

Lampiran

Nomor : B.893 /SJ.7/TU.220/VII/2024

Tanggal : 09 Agustus 2024

PROPOSAL YANG MEMENUHI KRITERIA PENILAIAN

No	Eselon I	No	Unit Pelayanan Publik	Judul Inovasi	Nilai
1	DJP KRL	1	Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang	Gerei Pelayanan Sini Situ	71.95
		2	LKKPN Pekanbaru	KADO SPESIAL (Kawasan Bando Spesifik Konservasi Alam Laut)	98.30
		3	Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang	Sila Dalipatik "Aksi Kolaboratif Pengendalian Sampah Plastik"	80.90
		4	Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang	Taman Karang Piracora	85.90
2	DJPT	1	BBPI	BULIK MANIS IDAMAN NELAYAN (Bubu Lipat Ikan Mantap dan Istimewa Idaman Nelayan)	99.13
		2	PPS Cilacap	SRIKANDI (Sistem Monitoring Kapal Ikan)	85.33
		3	PPN Palabuhanratu	SIRATU (Sistem Informasi Layanan PPN Palabuhanratu)	76.48
		4	PPN Tanjungpandan	SILAUT (Sistem Integrasi Layanan Usaha Terpadu)	86.50
		5	PPN Pemangkat	TERJALA (Integrasi Pelayanan Jasa dan Pengolahan Data)	89.20
		6	PPP Teluk Batang	SELASIH (Sistem Informasi Pelayanan Air Bersih)	87.25
3	DJPB	1	BBPBAP Jepara	SIMPEL KONTEK 24 JAM (SISTEM INFORMASI PELAYANAN DAN KONSULTASI TEKNIK 24 JAM)	76.30
		2	BBPBAT Sukabumi	FORDISBAT (Form Diseminasi Budidaya Air Tawar)	76.75
		3	BBPBAT Sukabumi	SILUBAT (Sistem Informasi Laboratorium Budidaya Air Tawar)	73.73
		4	BPBAP Takalar	SIKEPITING (Sistem Informasi Kinerja Pelayanan)	62.50

No	Eselon I	No	Unit Pelayanan Publik	Judul Inovasi	Nilai
				Berintegritas Inovatif No Gratifikasi)	
		5	BPBAP Takalar	Biru LautKu (Bibit Rumput Laut Kualitas Unggul)	85.62
		6	BPBAP Takalar	UVTA (Ultraviolet Tambak)	78.03
		7	BPBAP Ujung Batee	SIPPUTERI (Sistem Pelayanan Publik Terintegrasi)	70.15
		8	BPBAT Mandiangin	SIMITA (Sistem Pembenihan Tanpa Artemia)	78.93
		9	BPBAT Sei Gelam	PUSTINA (Patin Unggul Sakti Nusantara)	80.18
		10	BPBL Batam	SIMAPRO (SISTEM INFORMASI PELAYANAN ROBOTIK)	74.73
		11	BLUPPB Karawang	SiPATIN (Sistem Pelayanan Terintegrasi)	86.88
		12	BPIUUK Karangasem	SIGAP (Sistem InteGrasi Administrasi Pelayanan)	79.78
		13	BPKIL Serang	SMART KIT	74.88
4	DJPDSPKP	14	BPBAT Tatelu	SI-PAYANGKA (Sistem Informasi Pelayanan Terintegrasi, Aktual dan Akuntabel)	66.33
		1	Dit. Logistik	STELINA (Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional)	85.13
		2	Dit. PBM	GELATIN - Gerai Layanan Sertifikasi Kelayakan Pengolahan Ikan	85.28
		3	BPPPKP	INVAPRO KAPE (Inkubasi Bisnis Inovasi Produk Kelautan dan Perikanan)	93.08
		4	Dit. Usaha dan Investasi	Si Ikan Berprotein (Sistem Perizinan Berusaha Pengolahan Ikan Berbasis Resiko, Post Audit dan Terintegrasi)	76.98
5	DPSDKP	5	Dit. Pemasaran	KURAS IKAN (Kurasi Produk Perikanan Untuk UMKM Naik Kelas)	85.83
		1	Direktorat Pemantauan Operasi Armada	Kartu SALMON (Sistem Aktivasi Lacak dan Monitor)	78.43
		2	Sekretariat Direktorat Jenderal	SI IKAN GABUS (Sistem Informasi kenalKAN Gaji Berkala Untuk pegawai Sejahtera)	85.33
		3	Pangkalan PSDKP Jakarta	SIPINTER (Sistem Pelayanan Informasi Terpadu)	79.88
		4	Stasiun PSDKP Cilacap	CEKATAN (Cek Kapal Tanpa Antrean) Lebih Dekat, Lebih Cepat di Stasiun PSDKP Cilacap	84.45
		5	Stasiun PSDKP Belawan	SILVER (Sistem Informasi LVHPI Terpadu)	74.45
		6	Stasiun PSDKP Tahuna	UBI KUPAS (Laut Bersih, Kumpul Sampah dan Plastik)	86.38

No	Eselon I	No	Unit Pelayanan Publik	Judul Inovasi	Nilai
		7	Stasiun PSDKP Ambon	SAMANDAR (Sistem Perencanaan, Monitoring dan Pelaporan secara Daring) Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.	77.70
		8	Stasiun PSDKP Biak	Biak GO Link (Web Site Pelayanan Satu Link yang Dapat Mengakses Semua Web yang Digunakan Pelaku Usaha/Pengurus Kapal)	82.45
6	BPPSDMKP	1	LPTK	SI MARIBAJO (Sistem Informasi Kelautan untuk Nelayan Tradisional)	79.95
		2	BRBIH	LOCA FEED: Low Carbon Feed	84.58
		3	BP3 Medan	SIAPP BOSS: Sarana Informasi Aksi Pelayanan Publik BPPP Medan One Stop Service	83.60
		4	BP3 Ambon	Tabea Pelaut: Tanpa Biaya dan Antrean Lama Pendaftaran Pelatihan Kepelautan	78.20
		5	BP3 Banyuwangi	SI PANDA Aplikasi Pemeriksaan Buta Warna Digital)	81.80
		6	BP3 Bitung	BPPP Bitung <i>Mobile</i>	76.55
		7	BP3 Tegal	SILANGIT: Sistem Informasi Layanan Terintegrasi	76.80
		8	Politeknik KP Bitung	PIOnS: <i>Polytechnic Integrated Online System</i>	81.78
		9	SUPM Ladong	SIUSUPM: Sistem Ujian Sekolah Usaha Perikanan Menengah	64.88
		10	BPPSDM	SFV (SMART Fisheries Village)	83.70
		11	Politeknik KP Sidoarjo	Aplikasi PENTARU: Penerimaan Taruna Baru (Efektif, Efisien, Transparan)	85.63
		12	BDA Sukamandi	E-MILEA (Learning Management System Electronic Millennial Learning)	85.38
7	BPPMHKP	1	STASIUN KIPM PANGKAL PINANG	JAGA SI CEKATAN (Jejaring Gabungan Reaksi Cepat Kelautan dan Perikanan). Inovasi Non Digital Cepat Viral	87.25
		2	BALAI KIPM BALIKPAPAN	IKAN LAIS (APLIKASI KANTOR LAYANAN INFORMASI DAN SERTIFIKASI)	80.30
		3	BALAI KIPM MATARAM	Si Chupang New (Aplikasi Cukup Mudah dan Gampang New)	86.88
		4	STASIUN KIPM MERAUKE	Portal SiimutMerauke	78.20

Penanggung Jawab IKU

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.

Drh Adhi Dhaarmawan
NIP. 198506222010121001

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOTA DINAS

NOMOR : 132/BPPMHKP.1/KI.120/I/2025

Yth. : Kepala Pusat Data, Statistik dan Informasi KKP
Dari : Sekretaris Badan PPMHKP
Sifat : Biasa
Hal : Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Triwulan IV UPT BPPMHKP
Lampiran : 1 (satu) berkas
Tanggal : 13 Januari 2024

Sehubungan dengan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada masyarakat pengguna jasa layanan lingkup UPT BPPMHKP untuk Triwulan IV Tahun 2024, bersama ini kami sampaikan terdapat satu UPT yaitu BPPMHKP Gorontalo yang melakukan SKM secara manual dengan menyebarkan kuesioner secara luring kepada pengguna jasa dikarenakan terdapat kendala teknis yang tidak dapat dihindari pada tenggat waktu pelaksanaan SKM. Sehingga terdapat perbedaan nilai SKM antara aplikasi susan <https://ptsp.kkp.go.id/> dan hasil perhitungan yang melibatkan seluruh UPT BPPMHKP dengan rincian sebagai berikut:

No	Nilai SKM	Keterangan
1	94,87	Perhitungan 46 UPT melalui aplikasi Susan dan 1 UPT (BKIPM Gorontalo) menggunakan metode luring secara
2	94,89	Nilai BPPMHKP pada https://ptsp.kkp.go.id/

Sehingga untuk nilai SKM yang menjadi capaian BPPMHKP pada TW IV tahun 2024 adalah 94,87 dengan rata-rata per unsur 3.79 (Rekapitulasi terlampir).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Hari Maryadi

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

MEMORANDUM

NOMOR : 95/BPPMHKP.1/KI.120/I/2025

Yth. : Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan
Perikanan
Dari : Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan
Perikanan
Sifat : Biasa
Hal : Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Triwulan IV UPT BPPMHKP
Lampiran : 1 (satu) berkas
Tanggal : 9 Januari 2024

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik salah satunya dengan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada masyarakat pengguna jasa layanan. Tim Kerja Pelayanan Publik, Sekretariat BPPMHKP sebagai penanggung jawab pelayanan publik lingkup BPPMHKP, telah melaksanakan SKM lingkup UPT BPPMHKP untuk Triwulan IV Tahun 2024 yang berpedoman kepada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SKM Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPPP). Berkenaan dengan pelaksanaan survei tersebut, bersama ini kami laporkan hal hal sebagai berikut :

1. Kegiatan ini dilaksanakan pada periode Oktober s.d Desember 2024 dengan ketentuan:
 - a. SKM dilakukan secara online melalui alamat website <http://ptsp.kkp.go.id/skm/login> yang dapat diakses langsung oleh pengguna jasa layanan;
 - b. SKM dilakukan terhadap setiap layanan yang diberikan oleh UPT BPPMHKP selaku unit penyelenggara pelayanan (UPP) secara *real time*;
 - c. Unsur yang dilakukan survei antara lain:
 - 1). Persyaratan,

- 2). Sistem, mekanisme, prosedur,
 - 3). Waktu penyelesaian,
 - 4). Biaya/tarif,
 - 5). Produk layanan,
 - 6). Perilaku pelaksana,
 - 7). Kompetensi pelaksana,
 - 8). Penanganan pengaduan, dan
 - 9). Sarana prasarana;
- d. Hasil pelaksanaan SKM dipublikasikan kepada publik melalui berbagai media yang dimiliki, seperti: sosial media, (Instagram, Facebook dan Twitter), website, leaflet, brosur, banner, dll.
2. Hasil pelaksanaan SKM periode Triwulan IV tahun 2024, sebagai berikut :
- a. Jumlah UPT BPPMHKP yang melaksanakan SKM periode Triwulan IV sebanyak **47 UPT (seluruh UPT)**;
 - b. Nilai rata-rata SKM dari seluruh UPT BPPMHKP periode Triwulan IV tahun 2024 adalah **94,87** dengan mutu pelayanan kategori mutu **“Sangat Baik”**. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai rata-rata SKM Triwulan IV Tahun 2024 sudah di atas target IKU yaitu nilai rata-rata SKM di 47 Satker/UPT BPPMHKP adalah $\geq 88,30$;
 - c. Jumlah UPT BPPMHKP yang mendapat nilai SKM dengan kategori sangat baik adalah sebanyak 47 (empat puluh tujuh) unit kerja atau seluruh UPT BPPMHKP. Matriks hasil survei selengkapnya sebagaimana terlampir;
 - d. Nilai SKM 3 (tiga) UPT tertinggi:
 - i. Balai KIPM Balikpapan: 100,00
 - ii. Balai KIPM Ambon : 100,00
 - iii. Stasiun KIPM Padang : 100,00
 - e. Nilai SKM 3 (tiga) UPT terendah:
 - i. Balai Uji Standar KIPM : 88,82
 - ii. Stasiun KIPM Sorong : 89,07
 - iii. Stasiun KIPM Palu : 89,35

- f. Nilai rata-rata tiap unsur pelayanan untuk seluruh UPT BPPMHKP antara lain:

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-rata
1	Persyaratan	3,83
2	Sistem, Mekanisme & Prosedur	3,81
3	Waktu penyelesaian	3,76
4	Biaya/Tarif	3,80
5	Produk Spesifikasi jenis layanan	3,81
6	Kompetensi pelaksana	3,76
7	Perilaku Pelaksana	3,78
8	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	3,81
9	Sarana dan Prasarana	3,79
Rata-Rata		3,79

3. Analisis hasil survei dan rencana tindak lanjut :

- Pada survei kepuasan masyarakat lingkup UPT BPPMHKP Triwulan IV tahun 2024 terdapat 2.457 responden jumlahnya menurun apabila dibandingkan dengan Triwulan III tahun 2024 yaitu sebanyak 2.980. Nilai SKM pada Triwulan IV tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 1,34 dibandingkan nilai SKM pada Triwulan III tahun 2024 yaitu 93,53 naik menjadi 94,87;
- Selama Triwulan IV terdapat 2 (dua) UPT yang memiliki jumlah responden paling sedikit sebanyak 4 (empat) responden yaitu Balai KIPM Jayapura dan Stasiun KIPM Tahuna;
- Nilai unsur terendah yaitu waktu penyelesaian dan kompetensi pelaksana dengan nilai 3,76. Meskipun kompetensi petugas masih dalam kategori sangat baik namun pengguna jasa berharap petugas pelayanan selalu sigap dan responsif dalam melakukan pelayanan, serta mampu menyelesaikan pelayanan tepat waktu;
- Terdapat satu UPP yaitu SKIPM Gorontalo yang melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara manual dengan menyebarkan kuesioner secara luring kepada

pengguna jasa dikarenakan terdapat kendala teknis yang tidak dapat dihindari pada tenggat waktu pelaksanaan SKM;

e. Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk perbaikan nilai SKM antara lain:

i. Melakukan pembinaan kepada UPT BPPMHKP yang:

a) Nilai SKM dibawah target > 88,30; dan

b) Jumlah respondennya belum memadai.

ii. Melakukan perbaikan dan peningkatan pada unsur terendah yaitu kompetensi pelaksana dan perilaku pelaksana;

iii. Memastikan secara berkala bahwa setiap UPP melakukan SKM dan melaporkan hasilnya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan;

iv. Melakukan internalisasi budaya pelayanan prima kepada seluruh petugas pelayanan BPPMHKP;

v. Melakukan sosialisasi kepada pengguna jasa terkait penggunaan tools SUSAN KKP dalam melakukan survei kepuasan masyarakat;

vi. Melakukan penyegaran atau bimtek tentang peraturan perundang undangan yang terkait pelayanan pelayanan publik serta prinsip prinsip pelayanan prima.

Demikian kami sampaikan, mohon arahan Ibu lebih lanjut.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Hari Maryadi

Lampiran
 Nomor : 95/BPPMHKP.1/KI.120/I/2025
 Tanggal : 6 Januari 2025

Tabel Rekapitulasi Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
 Unit Pelayanan BPPMHKP Triwulan IV Tahun 2024

No.	UPT	Jumlah Responden	Nilai IKM (Rata-rata/ unsur)	SKM	Mutu Pelayanan	Kinerja UPP
1	Balai KIPM Balikpapan	35	4.00	100	A	Sangat Baik
2	Balai KIPM Ambon	8	4.00	100	A	Sangat Baik
3	Stasiun KIPM Padang	6	4.00	100	A	Sangat Baik
s4	Balai KIPM Jayapura	4	4.00	100	A	Sangat Baik
5	Stasiun KIPM Tahuna	4	4.00	100	A	Sangat Baik
6	Stasiun KIPM Ternate	86	3.99	99.74	A	Sangat Baik
7	Stasiun KIPM Pekanbaru	72	3.93	98.34	A	Sangat Baik
8	Stasiun KIPM Mamuju	7	3.92	98.02	A	Sangat Baik
9	Balai KIPM Banjarmasin	32	3.92	98	A	Sangat Baik
10	Stasiun KIPM Luwuk Banggai	36	3.92	97.99	A	Sangat Baik
11	Balai KIPM Mataram	23	3.91	97.71	A	Sangat Baik
12	Stasiun KIPM Pontianak	60	3.91	97.69	A	Sangat Baik
13	Stasiun KIPM Yogyakarta	13	3.90	97.44	A	Sangat Baik
14	Stasiun KIPM Batam	19	3.89	97.37	A	Sangat Baik
15	Balai KIPM Tanjung Pinang	123	3.85	96.14	A	Sangat Baik
16	Stasiun KIPM Merauke	17	3.84	96.08	A	Sangat Baik
17	Balai KIPM Semarang	73	3.83	95.74	A	Sangat Baik
18	Balai KIPM Surabaya II	102	3.82	95.59	A	Sangat Baik
19	Stasiun KIPM Jambi	22	3.82	95.58	A	Sangat Baik
20	Stasiun KIPM Bandung	25	3.82	95.44	A	Sangat Baik

No.	UPT	Jumlah Responden	Nilai IKM (Rata-rata/ unsur)	SKM	Mutu Pelayanan	Kinerja UPP
21	Stasiun KIPM Cirebon	54	3.81	95.32	A	Sangat Baik
22	Stasiun KIPM Kendari	35	3.81	95.24	A	Sangat Baik
23	Stasiun KIPM Bengkulu	15	3.80	95	A	Sangat Baik
24	Stasiun KIPM Bima	32	3.80	94.97	A	Sangat Baik
25	Stasiun KIPM Pangkal Pinang	64	3.78	94.62	A	Sangat Baik
26	Balai Besar KIPM Makassar	404	3.77	94.2	A	Sangat Baik
27	Balai KIPM Entikong	32	3.76	94.1	A	Sangat Baik
28	Balai KIPM Tarakan	6	3.76	93.98	A	Sangat Baik
29	Stasiun KIPM Palangkaraya	35	3.76	93.97	A	Sangat Baik
30	Balai KIPM Manado	45	3.74	93.46	A	Sangat Baik
31	Stasiun KIPM Palembang	67	3.73	93.33	A	Sangat Baik
32	Stasiun KIPM Bau-Bau	22	3.73	93.18	A	Sangat Baik
33	Balai KIPM Jakarta II	50	3.71	92.72	A	Sangat Baik
34	Balai KIPM Denpasar	264	3.70	92.5	A	Sangat Baik
35	Balai KIPM Surabaya I	90	3.69	92.16	A	Sangat Baik
36	Stasiun KIPM Aceh	12	3.66	91.44	A	Sangat Baik
37	Balai KIPM Lampung	29	3.65	91.28	A	Sangat Baik
38	Stasiun KIPM Medan II	100	3.63	90.83	A	Sangat Baik
39	Balai Besar KIPM Jakarta I	74	3.63	90.65	A	Sangat Baik
40	Stasiun KIPM Tanjung Balai Asahan	10	3.61	90.28	A	Sangat Baik
41	Balai KIPM Medan I	36	3.60	90.05	A	Sangat Baik
42	Stasiun KIPM Gorontalo	15	3.59	89.83	A	Sangat Baik
43	Stasiun KIPM Kupang	63	3.59	89.68	A	Sangat Baik
44	Stasiun KIPM Merak	11	3.58	89.39	A	Sangat Baik

No.	UPT	Jumlah Responden	Nilai IKM (Rata-rata/ unsur)	SKM	Mutu Pelayanan	Kinerja UPP
45	Stasiun KIPM Palu	6	3.57	89.35	A	Sangat Baik
46	Stasiun KIPM Sorong	76	3.56	89.07	A	Sangat Baik
47	Balai Uji Standar KIPM	43	3.55	88.82	A	Sangat Baik

Penanggung Jawab IKU

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dolly N. Rawung', written over a light gray rectangular background.

Dolly N. Rawung S.St.Pi
NIP. 197911052002122003

File Edit View History Bookmarks Profiles Tab Window Help Fri 10 Jan 14.27 IP ASN 2024 Dashboard Eselon Pegawai FAQ IP ASN 2023												
1	SEKRETARIAT BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	68	21.06	84.24 %	37.59	93.98 %	25	83.33 %	5	100 %	88.65	TINGGI
2	PUSAT MANAJEMEN MUTU	25	21.16	84.64 %	34.34	85.85 %	25	83.33 %	5	100 %	85.5	TINGGI
3	PUSAT PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU PRODUKSI PRIMER	20	21.85	87.4 %	37.48	93.7 %	25.25	84.17 %	5	100 %	89.58	TINGGI
4	PUSAT PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU PASCAPANEN	25	20.52	82.08 %	38.2	95.5 %	25	83.33 %	5	100 %	88.72	TINGGI
5	BALAI BESAR KIPM JAKARTA I	17	21	84 %	35.07	87.67 %	25	83.33 %	5	100 %	86.07	TINGGI
6	BALAI BESAR KIPM MAKASSAR	37	21.08	84.32 %	39.7	99.25 %	25	83.33 %	5	100 %	90.78	TINGGI
7	BALAI KIPM DENPASAR	16	21.69	86.76 %	38.34	95.85 %	25	83.33 %	5	100 %	90.03	TINGGI
8	BALAI KIPM SURABAYA I	47	21.11	84.44 %	38.99	97.47 %	25.11	83.7 %	5	100 %	90.2	TINGGI
9	BALAI KIPM MEDAN I	18	21.17	84.68 %	39.17	97.93 %	25	83.33 %	5	100 %	90.33	TINGGI
10	BALAI KIPM BALIKPAPAN	17	20.76	83.04 %	37.94	94.85 %	29.41	98.03 %	5	100 %	93.12	SANGAT TINGGI
11	BALAI KIPM JAYAPURA	10	21.6	86.4 %	35.59	88.98 %	25	83.33 %	5	100 %	87.19	TINGGI
12	BALAI KIPM JAKARTA II	20	21.5	86 %	36.38	90.95 %	25	83.33 %	5	100 %	87.88	TINGGI
13	BALAI KIPM SURABAYA II	42	21	84 %	39.64	99.1 %	25	83.33 %	5	100 %	90.64	TINGGI
14	BALAI KIPM MATARAM	16	21.81	87.24 %	39.41	98.52 %	27.5	91.67 %	5	100 %	93.73	SANGAT TINGGI
15	BALAI KIPM MANADO	16	21.06	84.24 %	38.91	97.27 %	25	83.33 %	5	100 %	89.97	TINGGI

Penanggung Jawab IKU

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Marfil Like Watung'.

Marfil Like Watung, S.Pi
NIP : 197703251198032003



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAM www.kkp.go.id SUREL set.bppmhkp@kkp.go.id

2 Januari 2025

Nomor : B.12/BPPMHKP.1/RC.610/I/2025
Lampiran : 1 berkas
Perihal : Hasil Penilaian Mandiri SAKIP TA 2024 UPT Lingkup BPPMHKP

Yth.

1. Kepala Pusat Manajemen Mutu, BPPMHKP;
2. Plt Kepala Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer, BPPMHKP;
3. Plt. Kepala Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen, BPPMHKP;
4. Kepala UPT lingkup BPPMHKP.

di
tempat

Dalam rangka mewujudkan Akuntabilitas Kinerja KKP sampai ke level satuan Kerja baik Pusat maupun Daerah Tahun 2024 berdasarkan Permen PAN RB 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai penyesuaian atas Peraturan Menteri PAN-RB Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP serta memperhatikan Surat Deputy Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Kementerian PAN RB Nomor B/65/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023 tentang Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 pada Poin 10 yang menyebutkan untuk mendorong peningkatan evaluasi AKIP internal unit organisasi Level II serta Surat Sekretaris BPPMHKP B.3977/BPPMHKP.1/RC.610/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024 tentang Hasil Sementara Penilaian Mandiri SAKIP TA 2024 UPT Lingkup BPPMHKP, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Rekonsiliasi Kinerja dan Penilaian Mandiri SAKIP ditujukan untuk melihat aspek Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi sebagaimana pedoman evaluasi PM SAKIP (yang dapat dilihat pada link <https://bit.ly/PedomanEvaluasiAKIP2024>) di seluruh unit kerja lingkup UPT BPPMHKP dalam hal peningkatan kualitas evaluasi akuntabilitas sehingga dapat menggambarkan tingkat akuntabilitas unit kerja yang dievaluasi dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik (*feedback*) perbaikan perencanaan kinerja, penerapan manajemen kinerja, dan peningkatan capaian kinerja unit kerja secara berkelanjutan.
2. Target kinerja Penilaian Mandiri SAKIP lingkup BPPMHKP Tahun 2024 sebesar **Nilai 82, Sebanyak 40 UPT (80,40%) telah memenuhi target kinerja dan sisanya 10 UPT (19,60%) belum memenuhi target kinerja karena rendahnya capaian pada komponen Pelaporan Kinerja dan komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**. Hasil Penilaian Mandiri SAKIP per Satker (Pusat dan UPT) lingkup BPPMHKP adalah sebagai berikut :

No.	Unit kerja	Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Nilai Akuntabilitas	Predikat
1	Sekretariat BPPMHKP	24.00	24.00	13.80	22.50	84.30	A
2	Pusat Manajemen Mutu	24.90	24.90	13.50	20.00	83.30	A
3	Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer	27.30	24.00	11.25	20.50	83.05	A
4	Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen	27.30	24.00	11.25	20.50	83.05	A
5	BBKIPM Jakarta I	22.80	24.00	13.50	22.50	82.80	A
6	BBKIPM Makassar	25.50	25.50	12.30	20.50	83.80	A
7	BKIPM Denpasar	24.00	23.10	13.50	22.50	83.10	A
8	BKIPM Surabaya I	24.00	22.20	13.50	22.50	82.20	A
9	BKIPM Medan I	22.20	24.00	13.50	22.50	82.20	A
10	BKIPM Balikpapan	24.00	24.00	12.75	21.25	82.00	A
11	BKIPM Jayapura	22.50	23.70	12.00	16.00	74.20	BB
12	BKIPM Jakarta II	23.70	23.70	13.50	21.25	82.15	A
13	BKIPM Surabaya II	24.00	25.50	11.10	22.50	83.10	A
14	BKIPM Mataram	24.00	27.00	12.60	20.00	83.60	A
15	BKIPM Manado	24.90	24.00	12.00	22.50	83.40	A
16	BKIPM Semarang	27.00	24.00	12.00	21.25	84.25	A
17	BKIPM Banjarmasin	23.10	24.30	13.50	22.50	83.40	A
18	BKIPM Lampung	22.20	27.00	13.50	20.00	82.70	A
19	BKIPM Ambon	27.00	24.00	12.75	20.00	83.75	A
20	BKIPM Entikong	22.20	24.60	13.50	22.50	82.80	A
21	BKIPM Tanjung Pinang	22.20	24.00	10.35	21.00	77.55	BB
22	BKIPM Tarakan	24.00	24.00	12.00	22.50	82.50	A
23	BUSKI PM	24.00	27.00	13.50	20.00	84.50	A
24	SKIPM Palembang	24.00	25.20	11.10	22.50	82.80	A
25	SKIPM Bandung	26.10	25.20	12.60	19.75	83.65	A
26	SKIPM Merauke	23.70	23.70	11.10	18.75	77.25	BB
27	SKIPM Pontianak	22.20	25.50	13.50	22.50	83.70	A
28	SKIPM Kendari	24.00	23.70	13.05	20.25	81.00	A
29	SKIPM Batam	25.50	25.50	10.35	21.00	82.35	A
30	SKIPM Padang	19.80	27.00	13.50	22.50	82.80	A
31	SKIPM Jambi	24.00	25.50	12.60	21.25	83.35	A
32	SKIPM Palu	24.00	24.00	12.60	22.50	83.10	A
33	SKIPM Palangkaraya	24.00	24.00	12.30	22.50	82.80	A
34	SKIPM Kupang	24.00	25.50	11.40	22.50	83.40	A
35	SKIPM Pangkal Pinang	24.00	25.50	11.40	21.25	82.15	A
36	SKIPM Ternate	22.20	27.00	12.60	22.50	84.30	A
37	SKIPM Yogyakarta	26.10	24.60	11.85	20.50	83.05	A
38	SKIPM Aceh	24.00	27.00	12.00	22.50	85.50	A
39	SKIPM Gorontalo	24.60	24.00	12.75	21.25	82.60	A
40	SKIPM Pekanbaru	22.80	27.00	12.60	22.50	84.90	A
41	SKIPM Medan II	25.20	24.00	12.60	22.50	84.30	A

No.	Unit kerja	Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Nilai Akuntabilitas	Predikat
42	SKIPM Sorong	24.00	24.00	12.90	22.50	83.40	A
43	SKIPM Bengkulu	24.00	27.00	12.00	22.50	85.50	A
44	SKIPM Cirebon	24.00	27.00	12.00	22.50	85.50	A
45	SKIPM Luwuk Banggai	24.00	25.20	11.10	22.50	82.80	A
46	SKIPM Tanjung Balai Asahan	20.70	19.80	9.75	12.50	62.75	B
47	SKIPM Bima	22.20	24.00	12.60	22.50	81.30	A
48	SKIPM Tahuna	16.50	22.20	12.00	18.75	69.45	B
49	SKIPM Bau-Bau	24.00	24.30	12.15	21.00	81.45	A
50	SKIPM Merak	24.00	24.00	11.10	22.50	81.60	A
51	SKIPM Mamuju	27.00	24.00	11.10	18.50	80.60	A

- Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas pencapaian indikator kinerja Penilaian Mandiri SAKIP untuk Satker lingkup yang telah mencapai target (**≥82 Nilai**) yang telah ditetapkan pada tahun 2024.
- Selanjutnya setiap satuan kerja (Pusat dan UPT) lingkup BPPMHKP, khususnya untuk 10 Satker dengan dibawah target (**≤82 Nilai**) diminta untuk melakukan perbaikan sesuai rekomendasi dan saran pada Lembar Kerja Evaluasi Penilaian Mandiri SAKIP dalam hal pengelolaan dan pelaporan kinerja agar dapat mencapai target indikator kinerja Penilaian Mandiri SAKIP periode Tahun 2025;
- Rincian detail Lembar Kerja Evaluasi Penilaian Mandiri SAKIP UPT lingkup BPPMKHP Tahun 2024 dapat dilihat pada aplikasi Kinerjaku masing-masing satker.

Demikian disampaikan. atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Hari Maryadi

Tembusan :

- Kepala Badan Pengendalian Dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Penanggung Jawab IKU

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Marfil Like Watung', with a horizontal line extending from the end.

Marfil Like Watung, S.Pi
NIP : 197703251198032003



NK Perencanaan Satuan Kerja

Monitoring / NK Perencanaan Satker

Download Excel

Tampilkan 10 entri

Cari:

No. ↑↓	Kode Satuan Kerja ↑↓	Satuan Kerja ↑↓	NK Perencanaan Anggaran ↑↓	Efektivitas	Efisiensi	
				Capaian RO ↑↓	Penggunaan SBK ↑↓	Efisiensi SBK ↑↓
1	567631	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MANADO	90,00	100,00	75,00	50,00

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Sebelumnya 1 Selanjutnya

Penanggung Jawab IKU

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Marfil Like Watung', with a horizontal line extending from the end.

Marfil Like Watung, S.Pi
NIP : 197703251198032003



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	049	032	567631	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MANADO	Nilai	100.00	91.81	96.50	100.00	100.00	96.83	85.42	94.11	100%	0.00	94.11
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.77	19.30	10.00	10.00	9.68	21.35				
					Nilai Aspek	95.91		98.33				85.42				

Penanggung Jawab IKU

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Marfin Like Watung', with a horizontal line extending from the end.

Marfin Like Watung, S.Pi
NIP : 197703251198032003

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
INSPEKTORAT JENDERAL

MEMORANDUM
NOMOR 1/ITJ.0/TU.140/I/2025

Yth. : 1. Inspektur I
2. Inspektur II
3. Inspektur III
4. Inspektur IV
5. Inspektur V
Dari : Sekretaris Inspektorat Jenderal
Hal : Laporan Hasil Rekonsiliasi Data dan Pembahasan TLRHP BPK-RI
Lingkup KKP pada Triwulan IV Tahun 2024
Lampiran : -
Tanggal : 2 Januari 2025

Sehubungan telah dilaksanakannya Rapat Rekonsiliasi Data dan Pembahasan TLRHP BPK-RI Lingkup KKP pada Triwulan IV Tahun 2024 antara Inspektorat Jenderal dengan unit Eselon I dan Tim BPK RI di Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tanggal 9 – 20 Desember 2024, bersama ini kami sampaikan laporan sebagai berikut:

1. Terdapat 435 rekomendasi dari semua unit Eselon I per Triwulan IV Tahun 2024 yang masih dipantau tindak lanjutnya, dan telah sesuai ditindaklanjuti sebanyak 168 rekomendasi, sehingga terdapat sisa (belum sesuai rekomendasi) sebanyak 267 rekomendasi dengan sisa nilai keuangan sebesar Rp112.536.051.462,44 Dengan rincian sebagai berikut :

Eselon I	Jumlah Rekomendasi Awal	Nilai Keuangan (Rp)			Progres TL	
		Data Sem II 2023	Tindak Lanjut	Sisa	Sesuai	Belum
Setjen	36	421.144.736,00	421.144.736,00	-	15	21
Itjen	6	23.878.250,00	23.878.250,00	-	4	2
Ditjen PKRL	44	277.148.762,52	52.494.698,00	224.654.064,52	10	34
Ditjen PT	153	119.379.197.182,16	22.675.278.632,17	96.703.918.549,99	51	102
Ditjen PB	91	11.977.003.417,76	2.489.046.453,70	9.487.956.964,06	44	47
Ditjen PDSPKP	23	3.646.371.155,02	1.651.723.641,00	1.994.647.514,02	10	13
Ditjen PSDKP	28	1.118.316.959,00	1.118.316.959,00	-	13	15
BPPSDMKP	46	5.311.470.396,85	1.186.596.027,00	4.124.874.369,85	18	28
BPPMHKP	8	11.350.000,00	11.350.000,00	-	3	5
Jumlah	435	142.165.880.859,31	29.629.829.396,87	112.536.051.462,44	168	267

2. Berdasarkan hasil telaahan Tim BPK RI pada Semester I 2024 masih terdapat beberapa rekomendasi pada masing-masing Eselon I antara lain :
 - a. Itjen : Terdapat 2 (dua) rekomendasi yang masih dalam proses penyelesaian yaitu

- LK 2020 temuan Pengamanan, Penatausahaan, Pemindahtanganan dan Pemanfaatan Aset Tetap Tidak Tertib dengan rekomendasi BPK merekomendasikan Menteri Kelautan dan Perikanan agar menginstruksikan Inspektur Jenderal melakukan reviu atas semua perjanjian Kerja sama pemanfaatan BMN di lingkungan KKP dengan pihak ketiga sesuai hasil koordinasi dengan DJKN. **Telaahan BPK Tindak Lanjut Belum Sesuai. Belum ada rekapitulasi atas semua perjanjian Kerja sama pemanfaatan BMN di lingkungan KKP dan checklist PKS yang sudah direview Itjen sesuai hasil Koordinasi dengan DJKN.** Hasil pembahasan prioritas dengan Tim BPK sebagai tindak lanjut untuk format matriks PKS perlu ditambahkan satu kolom link dokumen LHR dan dokumen tersebut diunggah juga di SIPTL. Adapun untuk satker yang belum direviu untuk didorong segera dilakukan reviu oleh Itjen.
- LK 2023 temuan Pengenaan Sanksi Denda Administratif atas Pelanggaran Terhadap Pemanfaatan Ruang Laut Secara Menetap yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha Terkait Pemanfaatan di Laut oleh Direktorat Jenderal PSDKP Belum Sesuai Ketentuan dengan rekomendasi BPK merekomendasikan Menteri Kelautan dan Perikanan agar menginstruksikan Irjen KKP supaya mereviu hasil penghitungan ulang nilai investasi PT BTIIG dan PT ANT Tbk sebagai dasar pengenaan sanksi denda administratif, serta menyampaikan hasilnya kepada BPK. **Hasil telaah Tim BPK, Belum sesuai karena masih terdapat rencana aksi yang belum dilakukan oleh KKP, diantaranya: 1) Belum terdapat Hasil Reviu Itjen KKP atas hasil perhitungan ulang nilai investasi PT BIIG dan PT ANT 2) Belum terdapat Tindak lanjut hasil reviu Itjen KKP atas hasil perhitungan ulang nilai investasi PT BIIG dan PT ANT.**
- b. Setjen : LK 2015 temuan Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Tetap Tidak Sesuai Ketentuan dengan rekomendasi BPK merekomendasikan Menteri Kelautan dan Perikanan agar menginstruksikan Sekretaris Jenderal untuk menegur secara tertulis kepada para kepala satker terkait yang tidak optimal melaksanakan tugas dan fungsinya dan segera menyelesaikan permasalahan terkait aset tetap serta melakukan inventarisasi dan penilaian atas akun aset di KKP. Telaahan Tim BPK, Belum dilengkapi kertas kerja rekapitulasi hasil inventarisasi dan penilaian aset-aset di KKP sesuai kondisi temuan pada LHP BPK RI. Terkait temuan dari Tim Setjen menginformasikan bahwa proses

akuisisi tanah serta pelepasan tanah berlarut-larut, terdapat lahan petani plasma seluas 151 Ha berupa kolam tambak serta rumah tipe 36 yang telah diusulkan untuk diserahkan kepada petani. Usulan tersebut telah disetujui oleh Kementerian Keuangan melalui Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-4934/A/2000 dengan nilai penggantian yang akan dihitung kemudian untuk dibayarkan oleh petani. Namun demikian para petani tersebut keberatan untuk membayar dikarenakan kondisi ekonomi mereka yang tidak mampu untuk membayar penggantian sehingga meminta agar pemerintah menghibahkan aset tersebut kepada petani. Bupati Karawang memfasilitasi keberatan tersebut dengan mengirimkan surat Nomor 523/4528-EK tanggal 15 Agustus 2006 kepada Menteri Kelautan dan Perikanan. Namun sampai dengan pemeriksaan berakhir proses pelepasan aset belum selesai.

- c. Ditjen PKRL : PDDT PNBK 2021 temuan KKP Belum Menetapkan Ketentuan Lebih Lanjut tentang Pengenaan PNBK PKKPRL atas Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut secara Menetap di Kawasan Perairan yang Menjadi Kewenangannya dengan rekomendasi BPK merekomendasikan Menteri Kelautan dan Perikanan agar membuat kesepakatan dengan Menteri LHK tentang mekanisme pengelolaan perizinan atas kegiatan pemanfaatan ruang laut di tujuh TN yang dikelola oleh KLHK. Telaahan Tim BPK, Belum ada kesepakatan dengan Menteri LHK tentang mekanisme pengelolaan perizinan atas kegiatan pemanfaatan ruang laut di tujuh TN yang dikelola oleh KLHK. Sebagai tindak lanjut dalam pembahasan prioritas dengan Tim BPK, untuk diunggah Surat Setkab Nomor B.0154/Ekon/03/2024 tanggal 8 Maret 2024, dan surat penjelasan dari Sekretaris/ Direktur PKRL bahwa kesepakatan dengan Menteri LHK tersebut sudah ada dalam Surat Setkab di atas, serta prakteknya sudah banyak izin KPRL yang terbit sesuai kesepakatan tersebut.
- d. Ditjen PSDKP : LHP Kinerja Semester I TA 2010 atas Pengadaan Kapal Pengawas, temuan Pelaksanaan Pengadaan Kapal Pengawas SDK Tidak Sesuai Kontrak Sehingga Mengakibatkan Kelebihan Pembayaran Sebesar Rp113.488.980,00, dengan rekomendasi Meminta pertanggungjawaban PT CBI untuk memenuhi item barang sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak. Telaahan Tim BPK, Berdasarkan kontrak, penambahan/pengurangan harus didukung persetujuan tertulis. Pihak KKP perlu melakukan penelusuran kembali terkait persetujuan tertulis atas penambahan/pengurangan pekerjaan tersebut. Adapun hasil pembahasan prioritas dengan Tim BPK sebagai tindak

lanjut untuk diajukan kembali Surat MKP kepada Auditor Utama Keuangan Negara IV Nomor B.1952/MEN-KP/XI/2023, 29 November 2023 Hal Usulan Rekomendasi Tidak Dapat Ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis dengan alasan yang sah atas pengadaan Kapal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Tahun 2009 dengan menambah penjelasan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam menindaklanjuti temuan berupa surat dari Dirjen PSDKP kepada Auditor Utama Keuangan Negara IV.

- e. Ditjen Perikanan Tangkap : LHP PNPB TA 2011-2013, temuan Terdapat tunggakan Pungutan Hasil Perikanan (PHP) pada Ditjen Perikanan Tangkap per 30 Juni 2013 sebesar Rp28.876.531.364,03 dan belum dikenakan denda minimal sebesar Rp34.560.777.416,13 dengan rekomendasi BPK RI merekomendasikan Menteri Kelautan dan Perikanan agar menginstruksikan Dirjen Perikanan Tangkap meningkatkan upaya penagihan atas tunggakan PNPB berikut dendanya. Hasil telaahan Tim BPK, dari sisa Rp33.373.034.871,13 telah ditindaklanjuti s.d. Semester I/2024 senilai Rp1.177.569.389,18, sehingga masih terdapat sisa tagihan tunggakan PNPB berikut denda senilai Rp32.195.465.481,95 yang belum disetor ke Kas Negara. Belum sesuai rekomendasi, belum seluruhnya disetor ke kas negara. Adapun hasil pembahasan prioritas dengan Tim BPK sebagai tindak lanjut untuk diusahakan penagihan maksimal kepada 25 kapal SIUP Aktif senilai Rp328.297.942, jika tidak ada respon penagihan yang baik maka diusulkan TPTD.
- f. BPPSDMKP : LK TA 2017, temuan Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Tetap Lainnya Belum Memadai dengan rekomendasi BPK merekomendasikan Menteri Kelautan dan Perikanan agar Menginstruksikan Eselon I terkait memerintahkan Kepala Satker: 1) Segera menyelesaikan upaya penelusuran, inventarisasi fisik, dan melengkapi dokumen-dokumen pendukung Aset Tetap yang berada dalam tanggung jawab pengelolaannya. 2) Mengajukan usulan penghapusan atas Aset Tetap dalam kondisi rusak berat sesuai dengan mekanisme. 3) Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Operator SIMAK BMN yang kurang cermat kurang cermat dalam mencatat dan melaporkan nilai Aset Tetap Lainnya. Telaahan Tim BPK, Tindak Lanjut belum mencakup seluruh rekomendasi, tindak lanjut. Segera update kertas kerja monitoring dokumen TL. Kertas kerja monitoring tidak hanya merinci TL tahun berjalan, namun juga TL dari tahun sebelumnya. Adapun hasil pembahasan

prioritas dengan Tim BPK diperoleh TL masih menunggu jawaban dari Bupati Kepulauan Tanimbar atas Surat Kepala BPPSDMKP No. B.608/BRSDM/PL.750/IV/2024 tanggal 1 April 2024 perihal Usulan Hibah Barang Milik Negara berupa Aset Tetap Renovasi milik Kementerian Kelautan dan Perikanan. Rencana tindak lanjut memonitoring jawaban dari surat bupati, jika menerima akan dihibahkan dan jika menolak akan dihapuskan atau menyusuli surat kembali ke Sekda dan BPKAD serta Bupati Kepulauan Tanimbar.

- g. Ditjen Perikanan Budi Daya : LHP Manajemen Aset 2005-2007, temuan Pelaksanaan Ruislag Tanah Tambak Milik Ditjen Perikanan Budidaya di Desa Segoro Tambak Jatim Seluas 472.440m² Berlarut-larut dan Berpotensi Merugikan Negara Senilai Rp1.414.023.000,00 dengan rekomendasi BPK menyarankan agar Dirjen Perikanan Budidaya menginstruksikan kepada Seditjen Perikanan Budidaya untuk meneliti kembali proses ruislag tanah dimaksud, apabila dilanjutkan supaya mempertimbangkan harga tanah saat ini. Hasil telaahan Tim BPK, proses negosiasi penggantian ruislag masih berlanjut dan belum final. Adapun hasil pembahasan prioritas dengan Tim BPK sebagai tindak lanjut penyelesaian ruislag agar dilanjutkan negosiasi dengan kuasa hukum PT. Semeru Cemerlang didampingi oleh Biro Hukum KKP dan untuk merevaluasi nilai ruislag tersebut dengan harga sekarang.
- h. Ditjen PDSPKP : LHP Manajemen Aset 2005-2007, temuan Pemanfaatan Barang Milik Negara Senilai Rp39.804.934.500,00 Tidak Sesuai Ketentuan dengan temuan BPK menyarankan Menteri Kelautan dan Perikanan agar mengajukan persetujuan kepada Menteri Keuangan atas pemanfaatan BMN yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, dan atas persetujuan tersebut kemudian dibuat perjanjian kerjasama yang memuat klausul mengenai besarnya kontribusi tetap yang harus dibayar setiap tahun ke Kas Negara dan pembagian keuntungan hasil kerjasama serta sanksi yang jelas dan tegas apabila terjadi wanprestasi. Hasil telaahan Tim BPK, belum ada penjelasan tertulis dari eselon I terkait dan reviu Itjen atas usulan penghapusan BMN di Pasar Ikan Hias (PIH) Pejompongan. Adapun hasil pembahasan prioritas dengan Tim BPK sebagai tindak lanjut untuk dilengkapi surat dari KKP ke Kemenkeu, surat balasan dari Kemenku ke KKP atas usulan hibah BMN kepada DKI Jakarta, Reviu Itjen terbaru, serta Surat Menteri Keuangan kepada Presiden Republik Indonesia nomor S-1032/MK.06/2024 tanggal 7 November

2024 perihal Permohonan Persetujuan Hibah Barang Milik Negara pada Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- i. BPPMHKP : LK TA 2019, temuan Pengelolaan Aset Tetap Belum Sepenuhnya Tertib dengan rekomendasi BPK merekomendasikan Menteri Kelautan dan Perikanan agar menginstruksikan Pejabat Eselon I terkait untuk memerintahkan Kepala Satker terkait: 1) Berkoordinasi dengan KPKNL untuk melengkapi persetujuan sewa BMN pada PIM Muara Baru; 2) Melakukan Inventarisasi BMN yang tidak diketahui keberadaannya; 3) Melakukan perbaikan pencatatan dalam aplikasi SIMAK BMN atas saldo yang bernilai negatif; 4) Segera melengkapi dokumen kepemilikan atas tanah dan IMB atas bangunan; 5) Berkoordinasi dengan KPKNL untuk menghapus KDP yang dihentikan penggunaannya; dan 6) Menyelesaikan hibah BMN yang berasal dari DK dan TP pada satker inaktif. Hasil telaahan Tim BPK, Tindak Lanjut yang disampaikan berupa SK Penghapusan, sedangkan dokumen lain belum ditindaklanjuti yaitu: 1.b. Bukti Surat Persetujuan Pengelola Barang. 2.b. Bukti hasil Inventarisasi BMN yang tidak diketahui keberadaannya pada DKP Provinsi Sumatera Selatan; dan 2.c. Bukti Perbaikan pada SIMAK BMN DKP Provinsi Sumatera Selatan. 3. Perbaikan pencatatan aplikasi yg bernilai negatif (screenshot aplikasi dan nilai minusnya atau file excelnya) 4. Agar dibuatkan matriks kepemilikan tanah dan IMB 5. Matriks rincian SK penghapusan KDP yang dihentikan penggunaannya per satker 6. Matriks rincian BAST hibah untuk satker DK dan TP Sehingga belum sesuai rekomendasi. Adapun hasil pembahasan prioritas dengan Tim BPK sebagai tindak lanjut untuk dibuat kertas kerja untuk IMB gedung dan bangunan (keseluruhan yg sudah, belum dan tidak bisa diterbitkan), sehingga tidak perlu diusulkan TPTD.
3. Terhadap rekapitulasi hasil rekonsiliasi data dan pembahasan TLRHP BPK-RI pada Triwulan IV Tahun 2024 disampaikan secara terlampir dan dapat diunduh pada link berikut <https://bit.ly/DataRekonTWEmpat2024> .
4. Dimohon bantuan Saudara untuk mendorong pemenuhan bukti tindak lanjut pada masing-masing mitra Eselon I, serta penyelesaian terhadap rekomendasi yang ditujukan kepada Inspektorat Jenderal.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Ivy Silfia Irani

Tembusan:
Inspektur Jenderal

Penanggung Jawab IKU

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Marfil Like Watung', with a horizontal line extending from the end.

Marfil Like Watung, S.Pi
NIP : 197703251198032003



SIDAK KKP
ELYZAL ZABET,
S.E

PENGAWASAN



BERANDA



MANAGE TLHP



TUTORIAL

SEKRETARIAT BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL PERIKANAN STATUS: SUKSES / PROGRES: 87.76%	PUSAT MANAJEMEN MUTU STATUS: FAILED / PROGRES: 76.71%	PUSAT PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU PRODUKSI PRIMER STATUS: FAILED / PROGRES: 60.00%
PUSAT PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU PRODUKSI PASCA PANEN STATUS: NOT AVAILABLE	BALAI UJI STANDAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN STATUS: SUKSES / PROGRES: 100.00%	BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAKARTA I STATUS: SUKSES / PROGRES: 100.00%
BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAKASSAR STATUS: SUKSES / PROGRES: 96.67%	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SURABAYA I STATUS: SUKSES / PROGRES: 100.00%	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MEDAN I STATUS: SUKSES / PROGRES: 100.00%
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN DENPASAR STATUS: SUKSES / PROGRES: 100.00%	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BALIKPAPAN STATUS: SUKSES / PROGRES: 100.00%	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MANADO STATUS: SUKSES / PROGRES: 100.00%
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MATARAM STATUS: SUKSES / PROGRES: 100.00%	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAYAPURA STATUS: SUKSES / PROGRES: 100.00%	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN ENTIKONG STATUS: SUKSES / PROGRES: 100.00%
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TARAKAN STATUS: SUKSES / PROGRES: 100.00%	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BANJARMASIN STATUS: SUKSES / PROGRES: 100.00%	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN LAMPUNG STATUS: SUKSES / PROGRES: 98.11%

Current temp
Near record



Q Search



1:44 PM
1/2/2025

Penanggung Jawab IKU

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Marfin Like Watung', with a horizontal line extending from the end.

Marfin Like Watung, S.Pi
NIP : 197703251198032003



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN INSPEKTORAT JENDERAL

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3522805
LAMAM www.kkp.go.id SUREL itjen@kkp.go.id

Nomor : B.519/ITJ.4/HP.660/XII/2024 10 Desember 2024
Sifat : Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Hasil Pengawasan Lainnya dalam rangka
Penilaian Efektivitas Pengawasan dan Kepatuhan
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ)
Tahun 2024 lingkup BPPMHKP

Yth. Sekretaris BPPMHKP
di Jakarta

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang ditetapkan, Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah melaksanakan Pengawasan Lainnya dalam rangka Penilaian Efektivitas Pengawasan dan Kepatuhan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Tahun 2024 lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), sebagaimana Surat Tugas Inspektur Jenderal KKP Nomor B.485/ITJ.4/KP.440/XI/ 2024, tanggal 28 November 2024, dengan hasil sebagai berikut:

1. Penilaian Efektivitas Pengawasan PBJ Tahun 2024 lingkup BPPMHKP dilaksanakan pada tanggal 2 s.d. 6 Desember 2024, terhadap 3 (tiga) komponen, dan memperoleh **nilai 91,98%** dari maksimum 100%. Hasil penilaian tersebut telah melebihi target Indikator Kinerja (IK) 8 pada Perjanjian Kinerja (PK) Itjen KKP Tahun 2024 yaitu Tingkat Efektivitas Pengawasan PBJ Lingkup KKP, serta IK 7 pada PK Inspektorat IV Tahun 2024 yaitu Tingkat Efektivitas Pengawasan PBJ lingkup Mitra Inspektorat IV, dengan target masing-masing sebesar 82%. Rincian penilaian efektivitas pelaksanaan pengawasan PBJ disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan PBJ lingkup BPPMHKP Tahun 2024

No	Komponen yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai
1	Kualitas Perencanaan Pengawasan	20	20,00
2	Kualitas Pelaksanaan Pengawasan	40	40,00
3	Nilai Rata-rata Tingkat kepatuhan PBJ lingkup BPPMHKP	40	31,98
Hasil Penilaian		100	91,98

Rincian Lembar Kerja Penilaian pada Tabel 1 terdapat pada Lampiran 1.

2. Penilaian Tingkat Kepatuhan PBJ lingkup BPPMHKP Tahun 2024 sebesar **84,34%** dari maksimum 100%. Nilai tersebut telah melebihi target pada PK BPPMHKP Tahun 2024, yaitu pada IK 28, dengan target 80%. Rincian penilaian kepatuhan PBJ lingkup BPPMHKP Tahun 2024 disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Tingkat Kepatuhan PBJ lingkup BPPMHKP Tahun 2024

No	Komponen yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai
1	Ketersediaan Manajemen Risiko PBJ Strategis BPPMHKP	10	10,00
2	Perencanaan dan Persiapan Pengadaan	15	13,75
3	Persentase Pemilihan PBJ yang Dilaksanakan melalui Sistem Pengadaan secara Elektronik (SPSE)	10	10,00
4	Kesesuaian Tahap Pelaksanaan	45	31,84
5	Laporan Penyelenggaraan PBJ	5	3,75
6	Persentase tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan PBJ lingkup BPPMHKP pada Triwulan I s.d. III Tahun 2023	15	15,00
Hasil Penilaian		100	84,34

Rincian Lembar Kerja Penilaian pada Tabel 2 terdapat pada Lampiran 2.

Meskipun telah melebihi target IK pada PK, namun berdasarkan penilaian lebih lanjut terhadap pelaksanaan PBJ lingkup BPPMHKP Tahun 2024, diketahui hal-hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

1. Belum seluruh paket PBJ diumumkan dalam SIRUP

Rencana PBJ yang telah di-*input* pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) per Triwulan III Tahun 2024 hanya 2.777 Paket PBJ, senilai Rp184.082.331.000, atau 99,32% dari total 2.788 Paket PBJ yang harus di-*input* di SIRUP senilai Rp185.343.009.000,00.

2. Terdapat keterlambatan penyelesaian pengadaan dan pembayaran

a. Belanja Modal

Terdapat 2 (dua) paket PBJ senilai Rp256.777.989,00, dari total 14 paket PBJ senilai total Rp2.020.603.696,00 yang terlambat penyelesaian pekerjaannya dan belum terdapat realisasi pembayaran pada periode akhir tugas Tim, per tanggal 6 Desember 2024. Kontrak dimaksud, yaitu:

- 1) Kontrak Nomor B.01.12/PPK/BKIPM.JKTII/PL.410/XI/2024 untuk Pengadaan Alat Pengolah Data pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (KIPM)/PPMHKP Padang senilai Rp85.943.000,00 yang dilaksanakan oleh PT. Cipta Pratama Solusindo, dengan periode akhir kontrak pada tanggal 29 November 2024; dan

2) Kontrak Nomor B.01.12/PPK/BKIPM.JKTII/PL.410/XI/2024 untuk Pengadaan Alat Pengolah Data senilai Rp161.180.000,00 yang dilaksanakan oleh PT. Cipta Pratama Solusindo, dengan periode akhir kontrak pada tanggal 29 November 2024.

b. Belanja Barang/Jasa

Terdapat 1 (satu) paket PBJ senilai Rp120.900.000,00, dari total 95 paket PBJ senilai total Rp10.612.011.998,00, yang terlambat pembayarannya pada periode akhir tugas Tim, per tanggal 6 Desember 2024. Kontrak dimaksud bernomor B.216.C/PPK-BPPMHKP.3/PL.420/XI/2024 untuk Pekerjaan Pengadaan Jasa *Fullboard* oleh PT. Citra Cikopo Hotel, dengan periode akhir kontrak pada tanggal 26 November 2024.

Rincian PBJ (Belanja Modal dan Belanja Barang/Jasa) dapat diakses pada:

<https://docs.google.com/document/d/1xNYHbgXt8Jkjo7gP4ESb5RQJga0lQcuh/e/dit?usp=sharing&oid=101693255689536754273&rtpof=true&sd=true>.

3. Belum seluruh hasil pengadaan sesuai *volume*

Berdasar hasil pengawasan Itjen KKP terhadap PBJ lingkup BPPMHKP Tahun 2024, diketahui terdapat kekurangan *volume* hasil PBJ, yaitu:

- a. Pada Balai KIPM/PPMHKP Semarang, sesuai Surat Tugas Nomor B.358/ITJ.4/KP.440/X/2024, tanggal 22 Oktober 2024, terdapat Pekerjaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 014/PPK.BKIPM.SMG/SPK/PL.420/VII/2024, tanggal 25 Juli 2024 senilai Rp47.307.201,89 oleh penyedia CV. Bangun Jaya, dengan kekurangan *volume* senilai Rp4.055.472,00;
- b. Pada Stasiun KIPM/PPMHKP Palangkaraya sesuai Surat Tugas Nomor B.456/ITJ.4/KP.440/XI/2024, tanggal 21 November 2024, terdapat:
 - 1) Pemeliharaan Kantor (perbaikan *plafond* dan dinding) sesuai SPK Nomor 126/KPA/PL.420/SKIPM.PKY/II/2024, tanggal 28 Februari 2024, senilai Rp14.430.000,00 oleh CV. Tata Bangun Konstruksi, dengan kekurangan *volume* senilai Rp913.000,00; dan
 - 2) Pemeliharaan Halaman Kantor (Perbaikan Lantai Teras Depan Kantor) sesuai SPK Nomor 206/KPA/SKIPM.PKY/PL.420/IV/2024, tanggal 30 April 2024, senilai Rp10.295.250,00, oleh CV. Seribu Dinar, dengan kekurangan *volume* senilai Rp875.000,00.

Berdasarkan konfirmasi dengan Analis Perencanaan, serta Ketua Tim Kerja (Katimja) Keuangan, Barang Milik Negara (BMN) dan Pengendalian Internal (PI) pada Sekretariat BPPMHKP, belum seluruh paket PBJ diumumkan dalam SIRUP dikarenakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Satuan Kerja (Satker) lingkup BPPMHKP belum melakukan revisi RUP secara berkala setelah dilaksanakan revisi anggaran. Sedangkan keterlambatan pekerjaan dan kekurangan volume pekerjaan terjadi karena kekurangcermatan KPA dan PPK dalam mengendalikan kontrak.

Berdasarkan hal tersebut, direkomendasikan kepada Saudara agar menginstruksikan tertulis, kepada:

1. Seluruh KPA Satker lingkup BPPMHKP agar tertib dalam mengumumkan rencana pengadaan pada SIRUP dan menyelesaikan PBJ sesuai kontrak/surat pesanan tepat waktu; dan
2. PPK pada Stasiun KIPM/PPMHKP Palangkaraya dan Balai KIPM/PPMHKP Semarang agar cermat dalam mengendalikan kontrak dan segera menindaklanjuti rekomendasi Itjen KKP terkait kekurangan *volume* pada hasil pengawasan PBJ.

Terhadap saran di atas, telah terdapat kesanggupan tindak lanjut pada Minggu ke-3 Desember 2024, sesuai Dokumen Hasil Penilaian dan Kesanggupan Tindak Lanjut yang ditandatangani Katimja Keuangan, BMN dan PI per 4 Desember 2024 dan dapat diakses pada: https://drive.google.com/file/d/1DxozTWpFuUh-M6E8T_IPIUfXRvkOROnj/view?usp=sharing

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n Inspektur Jenderal
Inspektur IV,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Lina Herlina

Tembusan:

1. Inspektur Jenderal
2. Inspektur II
3. Kepala BPPMHKP